

PROFIL GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN ENREKANG



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2019
(DATA TAHUN 2018)**

KATA PENGANTAR

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Sedikitnya ada dua hal yang tersirat dalam PUG. Hal yang pertama adalah terintegrasinya kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan yang dapat dipenuhi antara lain dengan terlibatnya laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan terutama sebagai pengambil keputusan. Hal kedua adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan dapat sama-sama menikmati hasil pembangunan. Untuk dapat mengetahui status dan cara mengintervensi kedua hal tersebut, peranan data terpilah sangat besar, karena tanpa kehadirannya sulit untuk melihat dan mengukur keberhasilan PUG.

Untuk memonitor kemajuan pencapaian pembangunan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengarusutamaan gender di Enrekang, maka profil ini disusun sebagai salah satu alat ukurnya. Publikasi profil gender ini mencantumkan beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan kesetaraan gender, sekaligus beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah karena pencapaiannya masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa aspek yang disajikan dalam publikasi ini profil gender dari aspek kependudukan, ekonomi, sosial, dan politik.

Publikasi ini merupakan hasil kerja Pengelola Bidang Data dan Informasi, dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Enrekang. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Enrekang, Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Enrekang

ttd

SAWALIAH BAHARUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAGIAN 1 PROFIL GENDER	
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan	2
Sumber Data	2
Sistematika Penyajian	2
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER	3
Indeks pembangunan Gender	5
Indeks Pemberdayaan Gender	10
GENDER DALAM PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	13
Peserta KB Aktif	17
KETIMPANGAN GENDER DI PASAR KERJA	20
Ketenagakerjaan	21
PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	26
Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif	26
Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Eksekutif.....	28
KETIMPANGAN GENDER DI SEKTOR EKONOMI.....	31
Ketimpangan Gender Di Sektor Koperasi dan UMKM	32
Peran Gender Di Sektor Pertanian Dan Perkebunan	33
Ketimpangan Peran Gender di Sektor Peternakan dan Perikanan	35
Ketimpangan Gender di Sektor Perindustrian dan Perdagangan dan Sektor Tenaga Kerja	37
KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN	39
Literasi Perempuan	40
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.....	42
BAGIAN 2 PROFIL ANAK	
PENDAHULUAN.....	46
Latar Belakang.....	46
Tujuan	47
Sumber Data	47
Sistematika Penyajian	47

STRUKTUR PENDUDUK USIA ANAK (0 – 17 TAHUN)	48
Bonus Demografi	52
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	54
Hak Atas Kepemilikan Akta Kelahiran	54
PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA	59
Pengasuhan Alternatif	59
Perkawinan Usia Anak	63
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU	68
Imunisasi	71
Akses ke Pelayanan Kesehatan	73
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU	75
LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA	75
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	77
Angka Partisipasi Murni (APM)	79
Angka Partisipasi Kasar (APK)	80
Pemanfaatan Waktu Luang	83
PERLINDUNGAN KHUSUS	85
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	85
Anak Yang Bekerja	88
Anak Korban Kekerasan	89
TIM PENYUSUN	92
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 1. IPM Indonesia dan Komponen, 2018	4
--	---

DAFTAR TABEL :

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 (%)	40
Tabel 2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	49
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Enrekang Tahun 2018	50
Tabel 4. Jumlah Anak Berumur 0-18 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, Tahun 2016 - 2018.....	55
Tabel 5. Jumlah sekolah dan Murid Taman Kanak-kanak menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2018	62
Tabel 6. Daftar Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini) tahun 2018	64
Tabel 7. Persentase Penduduk berumur 10 Tahun ke atas Menurut Karakteristik dan status Perkawinan Tahun 2018	66
Tabel 8. Jumlah Bayi yang Mendapat IMD dan di Beri ASI Eksklusif berdasarkan Kecamatan Tahun 2018	69
Tabel 9. Persentase Balita 0-23 bulan menurut pernah/tidak diberi ASI di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	70
Tabel 10. Cakupan Imunisasi dasar lengkap, dan Imunisasi lanjutan pada bayi menurut Kecamatan	72

Tabel 11. Cakupan pelayanan anak balita menurut kecamatan kabuapten Enrekang Tahun 2018	73
Tabel 12. Cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut jenis kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Enrekang Tahun 2018.....	74
Tabel 13. Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	78
Tabel 14. Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Enrekang ,2018	78
Tabel 15. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang ,2018	80
Tabel 16. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang ,2018	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tren IPM dan IPG Sulawesi Selatan Periode 2010 – 2018	5
Grafik 2 Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2018	6
Grafik 3. Umur Harapan Hidup Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018	7
Grafik 4. Perkembangan HLS laki-laki, HLS Perempuan dan Total HLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018	8
Grafik 5. Perkembangan RLS laki-laki, RLS Perempuan dan Total RLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018	8
Grafik 6. Perkembangan Pengeluaran Perkapita disesuaikan laki-laki dan perempuan dan total pengeluaran disesuaikan di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018	9
Grafik 7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	11
Grafik 8. Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2018	12
Grafik 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018.....	14
Grafik 10. Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	14
Grafik 11. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin Tahun 2018.....	15
Grafik 12. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kab. Enrekang	16
Grafik 13. Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Status Perkawinan di Kab. Enrekang	16

Grafik 14. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	17
Grafik 15. Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang	18
Grafik 16. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, Tahun 2012-2018 (Periode Agustus 2018) (%).....	21
Grafik 17. Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	22
Grafik 18. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun 2018	23
Grafik 19. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2018 (Periode Agustus) (%).....	24
Grafik 20. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	24
Grafik 21. Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	25
Grafik 22. Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018	26
Grafik 23. Jumlah Pejabat yang Menduduki Jabatan Eselon II-IV Menurut Jenis Kelamin di Lingkup Kabupaten Enrekang Tahun 2018	29
Grafik 24. Jumlah Pejabat Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Lingkup Kabupaten Enrekang Tahun 2018	30
Grafik 25. Jumlah Pengurus Koperasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2017	32

Grafik 26. Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun 2018	34
Grafik 27. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun 2018	36
Grafik 28. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	38
Grafik 29. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten di Sulawesi Selatan, Tahun 2018	43
Grafik 30. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Bentuk Kekerasan di Kab. Enrekang, Tahun 2018	44
Grafik 31. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Enrekang ,2018	79
Grafik 32. Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Enrekang, Tahun 2018	82
Grafik 33. Report bentuk kekerasan, tempat kejadian dan pelayanan Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Basis Data tanggal Kejadian Semester 1 s/d Semester 2 Tahun 2018	90
Grafik 34. Data ciri korban dan pelaku Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Basis Data tanggal Kejadian Tahun 2018	91

DAFTAR DIAGRAM

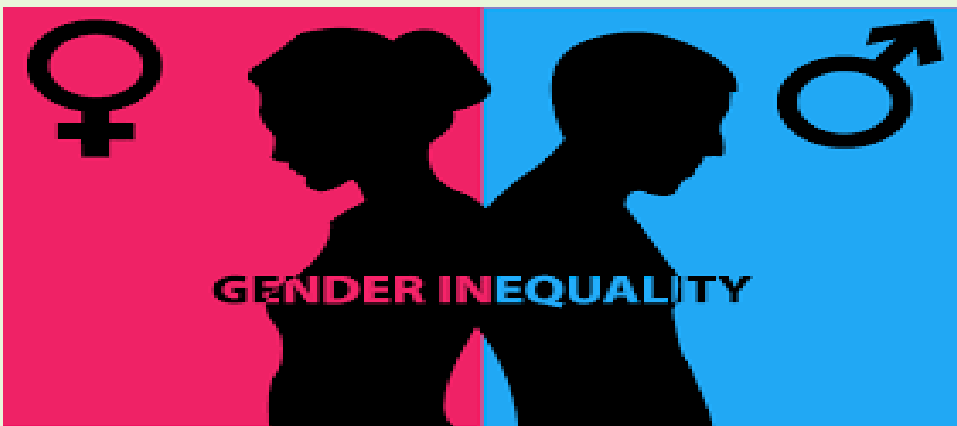
Diagram 1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Menurut Jenis Kelamin Periode Tahun 2019-2024	27
Diagram 2. Persentase Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Enrekang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2024	28
Diagram 3. Persentase Pelaku Usaha Peternakan Menurut jenis Kelamin di Kab. Enrekang, Tahun 2018	35
Diagram 4. Jumlah Pelaku Usaha Industri Menurut Jenis Industri dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	37
Diagram 5. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Jenis Kelamin di Perpustakaan Kab. Enrekang Tahun 2018.....	41
Diagram 6. Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	43
Diagram 7. Persentase Korban Kekerasan Menurut Status Usia di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	44
Diagram 8. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Kabupaten Enrekang, Tahun 2018	56
Diagram 9. Jumlah pekerja anak di kabupaten enrekang tahun 2018	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	93
Lampiran 2. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018.....	93
Lampiran 3. Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	94
Lampiran 4. Jumlah Anak Balit Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kab. Enrekang Tahun Data 2018.....	94
Lampiran 5. Jumlah Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	95
Lampiran 6. Jumlah peserta Didik SD LB Menurut Jenis Kelamin umur 7—12 di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	95
Lampiran 7. Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tingkat Sekolah Menengah Pertama	96
Lampiran 8. Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	96
Lampiran 9. Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018.....	97
Lampiran 10. Jumlah Penyuluh pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018.....	97
Lampiran 11. Jumlah Data Penduduk Kecamatan menurut Luas Wilaya, Jumlah Penduduk dan Jumlah Desa/ Kelurahan di Kab. Enrekang Tahun Data 2018....	98
Lampiran 12. Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	98
Lampiran 13. Jumlah Pendudk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	99

Lampiran 14. Jumlah Data Anak Nikah Usia Dini Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	99
Lampiran 15. Jumlah Data Pelaku Usaha Peternakan Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	100
Lampiran 16. Jumlah Pegawai Dinas PU Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018.....	100
Lampiran 17. Jumlah ASN Dinas PU Berdasarkan Pangkat Golru di Kab. Enrekang Tahun Data 2018.....	101
Lampiran 18. Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	101
Lampiran 19. Jumlah Pengojek Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	102
Lampiran 20. Jumlah Anak Usia 5-18 Tahun yang Mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	102
Lampiran 21. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kecamatan di Kab. Enrekang Tahun Data 2018	103

BAGIAN



PROFIL GENDER

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian nasional, tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan kualitas hidup manusianya. Secara umum pencapaian pembangunan kapabilitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan yang nyata. Namun, apakah pembangunan kapabilitas manusia di Indonesia ini telah memberikan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan? Apakah masih ada kesenjangan pencapaian pembangunan kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender?

Publikasi ini mencoba memberikan gambaran data dan informasi pembangunan manusia berbasis gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari dalam suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Saat ini IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan dan IPM laki-laki. Penghitungan IPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

IPG dan IDG merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Profil gender ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender di Sulawesi Selatan.

Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi tentang kondisi pengarusutamaan gender di berbagai sektor di Enrekang.

Sumber Data

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus dan Data Sektoral

Sistematika Penyajian

Profil Gender memuat indikator pembangunan manusia berbasis gender, gender di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan kekerasan terhadap perempuan.

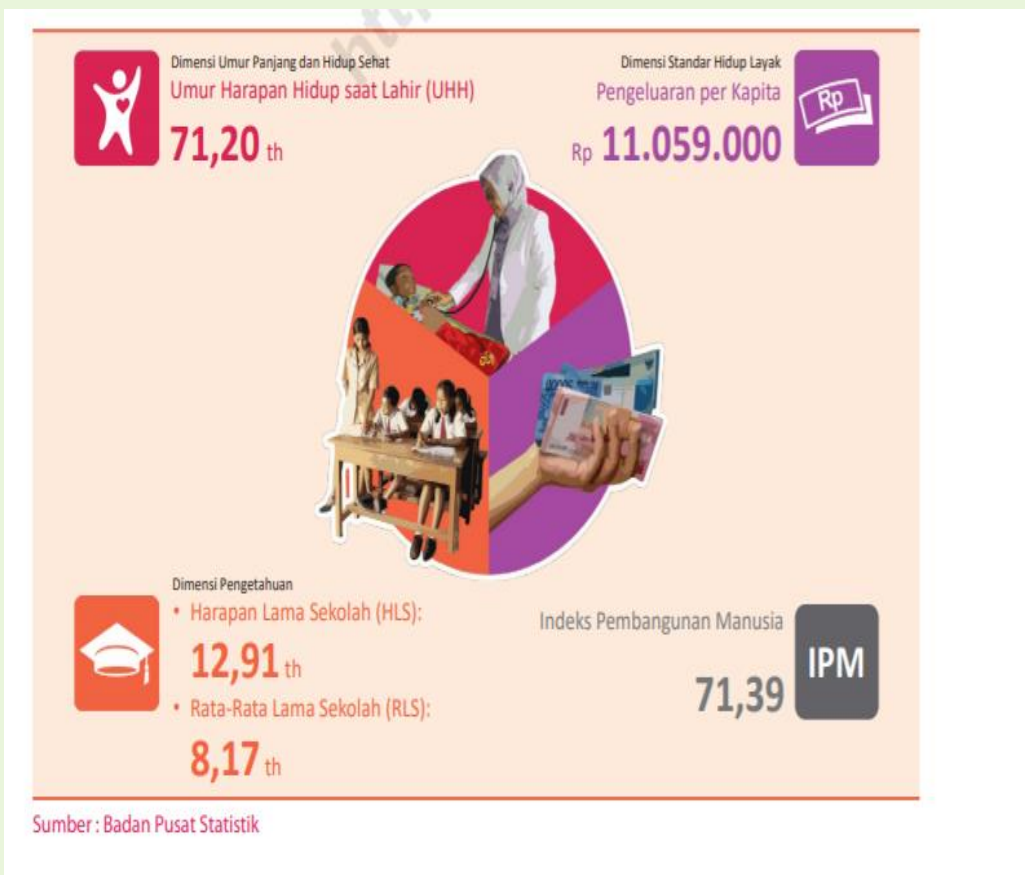
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia hingga tahun 2030. TPB mencakup tujuh belas tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai 71,39, meningkat sebesar 0,58 dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga bagi Indonesia berstatus pembangunan manusia “tinggi”. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,20 tahun yang berarti bahwa bayi yang baru lahir diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga usia 71,20 tahun. Penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII, sedangkan penduduk berusia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun atau setara dengan Diploma I. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp11.059.000,00 (diseragamkan) per kapita per tahun.

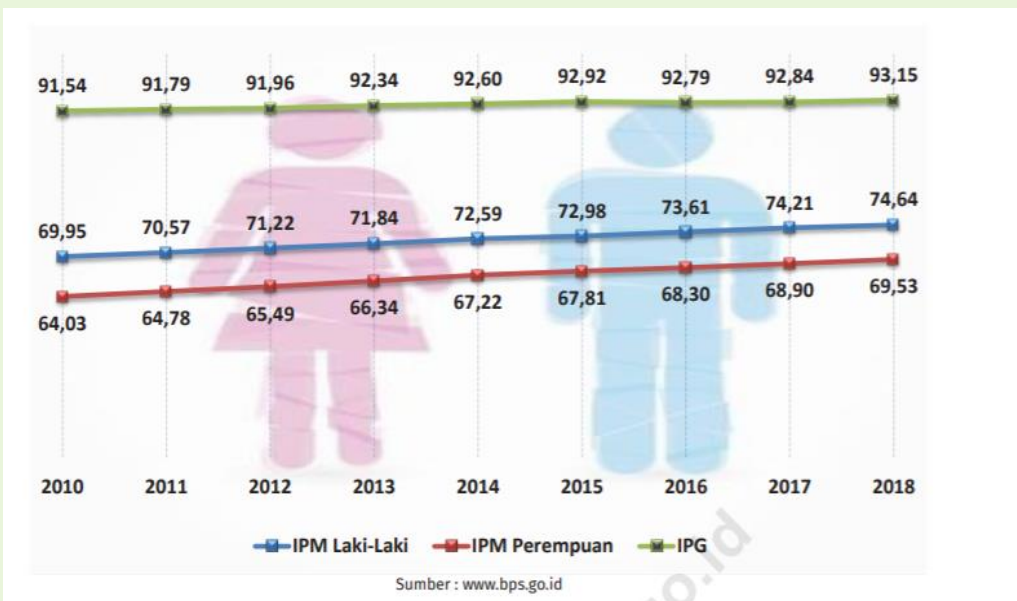
Secara umum pencapaian pembangunan manusia dan gender di Sulawesi Selatan semakin membaik , meskipun capaian pembangunan manusia perempuan belum mampu menyamai laki-laki. IPM laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Gambar 1. IPM Indonesia dan Komponen, 2018



Disparitas capaian antargender tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2018 IPG Indonesia mencapai 90,99 yang berarti bahwa IPM perempuan masih dibawah laki-laki. IPM laki-laki di Indonesia mencapai 75,43 atau berstatus “tinggi”, sedangkan IPM perempuan mencapai 68,63 atau masih berstatus “sedang”. Untuk Sulawesi Selatan, IPM laki-laki mencapai 74,64 sedangkan IPM Perempuan mencapai 69,53

Grafik 1. Tren IPM dan IPG Sulawesi Selatan Periode 2010 – 2018

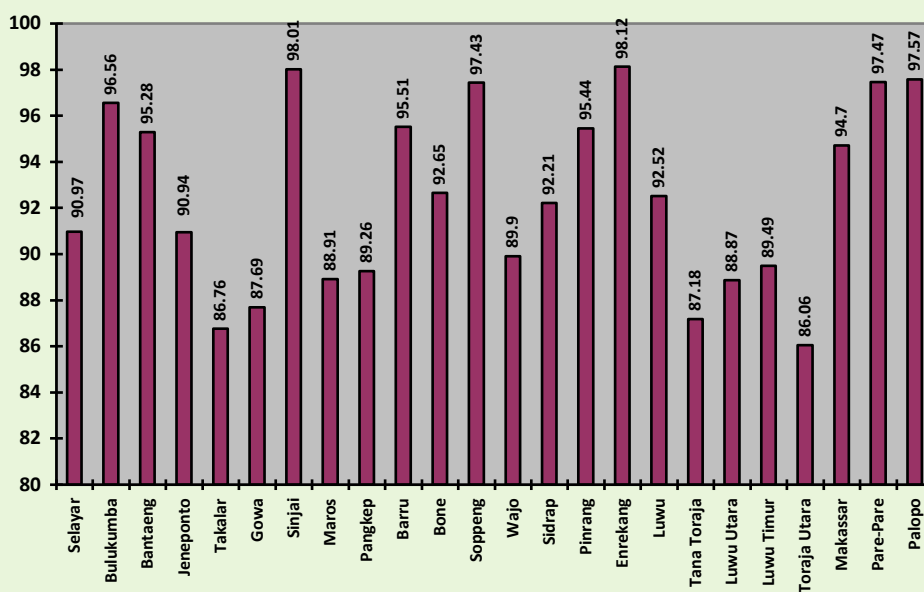
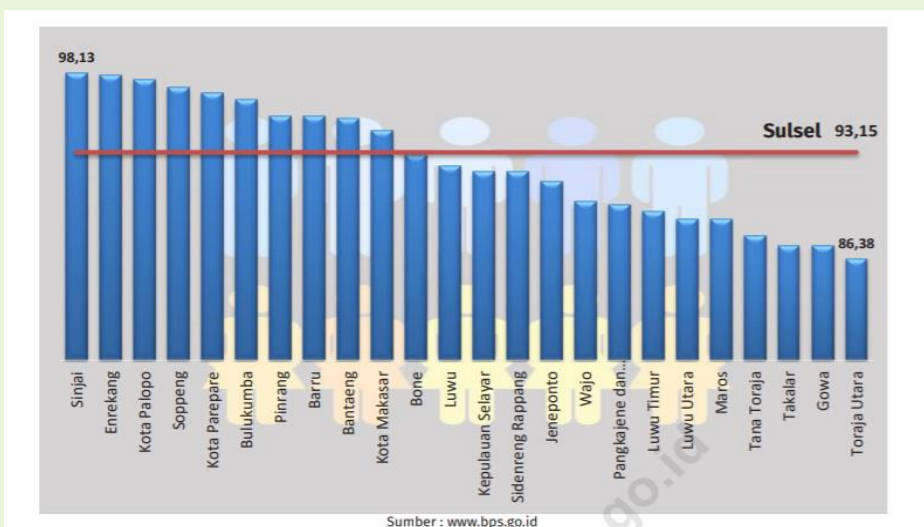


Sumber data : BPS Data Diolah

Indeks pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Enrekang menunjukkan capaian sebesar 97,99 tahun 2018. Semakin rendah IPG suatu wilayah menunjukkan semakin besar ketimpangan yang terjadi antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki; $IPG < 100$ menunjukkan capaian perempuan lebih rendah dari capaian laki-laki.

Grafik 2 Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2018



Sumber data : BPS Prov. Sulsel

IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Grafik 3. Umur Harapan Hidup Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018



Sumber data : BPS Prov. Sulsel

Meski AHH laki-laki lebih rendah dibanding perempuan percepatan AHH laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Secara akumulasi AHH di Sulawesi Selatan tahun 2018 telah mencapai angka usia 70,08 tahun.

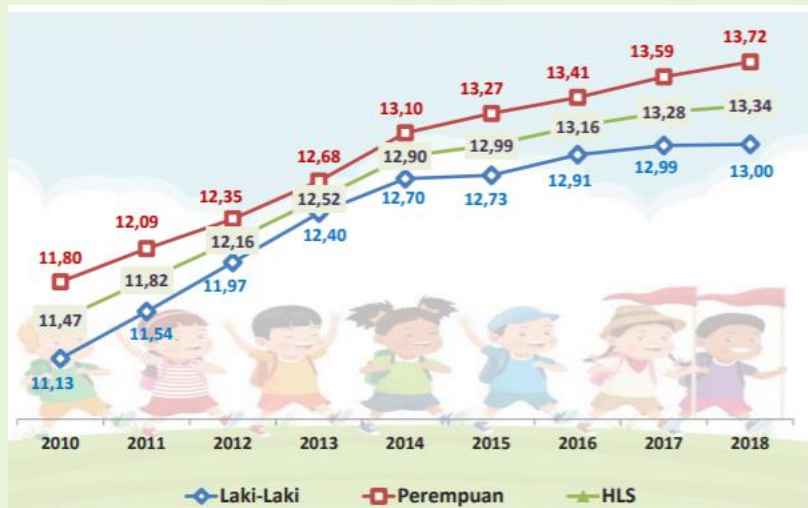
Untuk variabel angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Enrekang, perempuan mencapai 72,46 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang hanya mencapai 68,53 tahun.

Kualitas pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan diwakili oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS mengukur peluang anak sekolah di masa mendatang. Indikator ini diukur pada penduduk di atas usia 7 tahun. HLS juga merupakan pendorong (Booster) untuk meningkatkan RLS. Secara agregat HLS Sulawesi Selatan bertambah setiap tahun.

Seperti angka harapan hidup, peluang sekolah perempuan sedikit lebih baik yaitu 14,16 dibandingkan laki-laki 13,41. Rendahnya peluang bersekolah laki-laki dibanding perempuan terkait fenomena di antaranya jumlah tenaga

kerja anak laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ekonomi memaksa pekerja anak untuk bekerja, yang berimbas putus sekolah. Pada tahun 2018, HLS perempuan tercatat 13,72 tahun sedangkan laki-laki 13,00 tahun.

Grafik 4. Perkembangan HLS laki-laki, HLS Perempuan dan Total HLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018



Sumber : www.bps.go.id

Berbeda dengan HLS, tahun 2018 secara rata-rata, laki-laki di Sulawesi Selatan sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,32 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara perempuan masih sekitar 7,76 atau setara dengan kelas 1-2 SMP. Secara rata-rata, trend pertumbuhan RLS perempuan 1,46 persen lebih tinggi dari laki-laki 0,93 persen dari tahun 2010-2018.

Grafik 5. Perkembangan RLS laki-laki, RLS Perempuan dan Total RLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018



Sumber data : BPS Prov. Sulsel, data diolah

Secara Gender, dari Tahun 2010-2018 pengeluaran per kapita yang disesuaikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Meski secara rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun senjang pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi. Di tahun 2018 tercatat pengeluaran per kapita laki-laki, 15,49 juta rupiah sedangkan perempuan 9,59 juta rupiah. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang merupakan perbandingan antar jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja.

Grafik 6. Perkembangan Pengeluaran Perkapita disesuaikan laki-laki dan perempuan dan total pengeluaran disesuaikan di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018



Sumber data : BPS Prov. Sulsel, data diolah

Indeks Pemberdayaan Gender

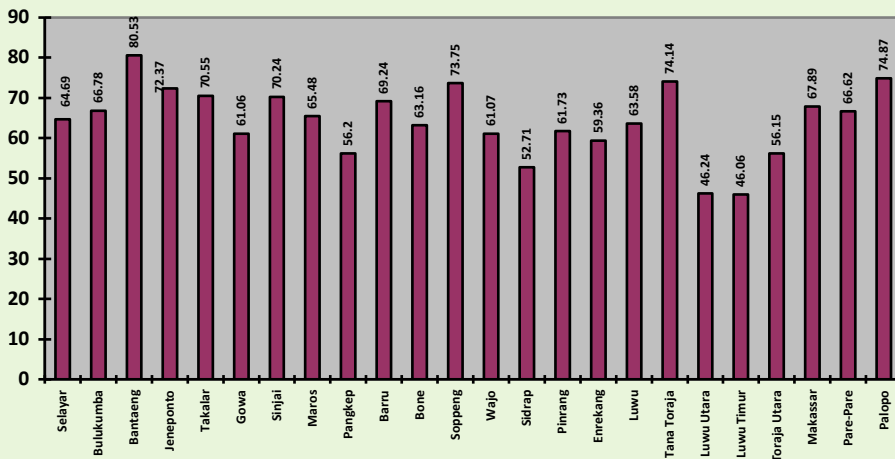
Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah Indeks Komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measure (GEM)* yang dihitung oleh UNDP. Indeks pemberdayaan Gender menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung, meliputi dimensi Keterwakilan di Parlemen, Pengambilan keputusan, dan Distribusi pendapatan. Indikator pengukurannya adalah 1) Proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen, 2) Proporsi laki-laki dan perempuan sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, serta 3) Upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non pertanian.

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan
Distribusi pendapatan	Upah buruh non pertanian; laki-laki dan perempuan

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2018



Sumber data : BPS Prov. Sulsel

Perkembangan IDG Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir , dan mencapai angka 70,57 di tahun 2017. Namun di tahun 2018, angka IDG Sulsel mengalami penurunan menjadi 69,14. Angka ini masih di bawah angka IDG nasional (72,10) . Penurunan angka IDG Sulsel disebabkan oleh menurunnya keterlibatan perempuan dalam parlemen di tahun 2018.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki- laki dan perempuan dalam berpolitik. Meskipun dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki namun angka indeks keterwakilan perempuan dalam periode 2010 hingga 2017 mengalami kenaikan. Penurunan terjadi di tahun 2018.

Grafik 8. Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2018



Sumber : *bps.go.id*

Capaian setiap indikator pembentuk IDG di Kabupaten Enrekang adalah 59.36%, untuk Indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen 6,67%, Indeks perempuan sebagai tenaga profesional , kepemimpinan, dan teknisi 55.56% dan untuk Indeks sumbangan pendapatan perempuan 36,23%.

GENDER DALAM PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan terletak di tengah-tengah bagian utara Jazirah Sulawesi Selatan yang diapit pada sebelah timur Gunung Latimojong dan sebelah barat terdapat bentangan Sungai Saddang.

Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak di antara $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50'0''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}40'56''$ - $120^{\circ}6'33''$ Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

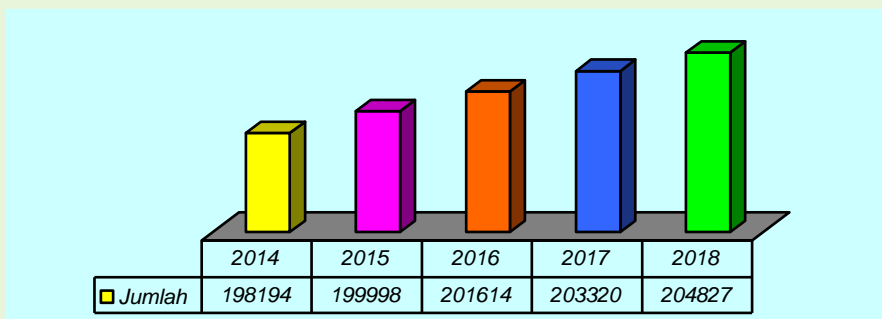
Kabupaten Enrekang memiliki wilayah dengan luas 1.786.06 km² dengan persentase terhadap keseluruhan luas Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 2,83 persen. Pemerintah Kabupaten Enrekang menaungi 12 kecamatan dengan 17 keluarahan dan 112 desa.

Wilayah Kabupaten Enrekang juga terkenal dengan sebutan "MASSENREMPULU" yang bermajna wilayah yang terletak di lereng pegunungan.

Penduduk dikonotasikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, wilayah atau negeri dan merupakan asset pembangunan atau sering disebut sumber daya manusia.

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 menembus angka 204.827 jiwa dengan jumlah rumah tangga 45.823 dan kepadatan penduduk 2152.69.

Grafik 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018

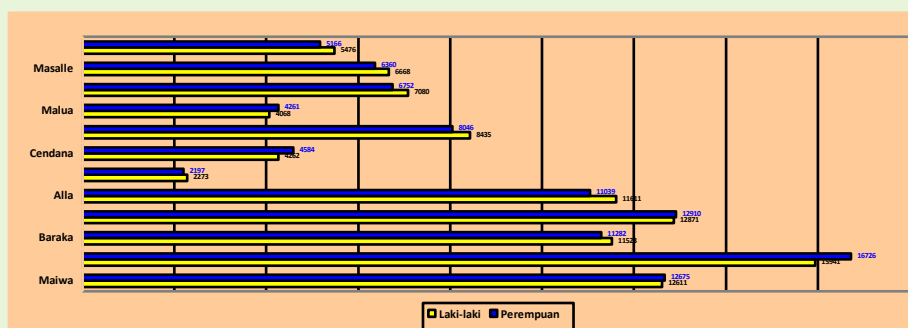


Sumber :

Terjadinya pertumbuhan penduduk diantaranya adalah karena adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang relatif besar terjadi di daerah perkotaan. Hal ini adalah wajar, karena kegiatan ekonomi masyarakat berpusat di daerah perkotaan.

Selama Tahun 2018, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Enrekang yaitu 32.667 jiwa terdiri dari 16,726 penduduk laki-laki dan 15.941 penduduk perempuan. Kecamatan Bungin merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan kecamatan lain yaitu 4.470 jiwa terdiri dari 2.197 laki-laki dan 2.273 perempuan.

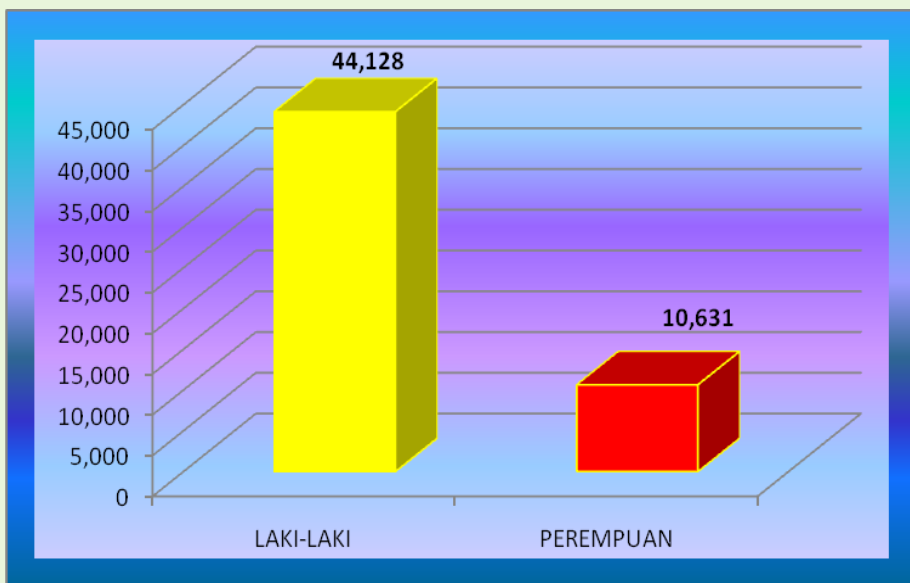
Grafik 10. Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber Data: BPS Enrekang

Besarnya komposisi jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki perlu dilihat sebagai potensi, mengingat peran penting perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Yang tak bisa dikesampingkan adalah peran perempuan sebagai pencetak generasi-generasi penerus, untuk konteks ini, perlu perhatian serius khususnya terhadap kesehatan perempuan sebagai calon ibu.

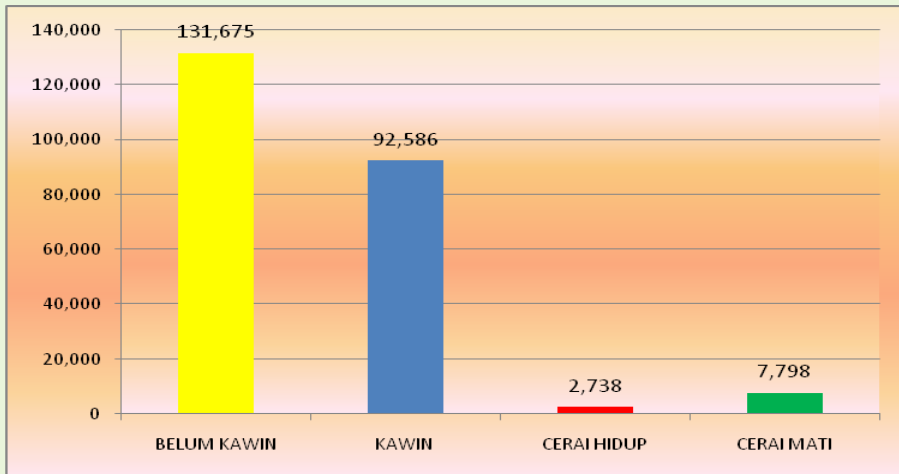
Grafik 11. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber data : Disdalduk dan KB Kab. Enrekang

Pada grafik 11 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki pada tahun 2018 sebesar 44,128 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kepala keluarga perempuan sebesar 10,631 orang.

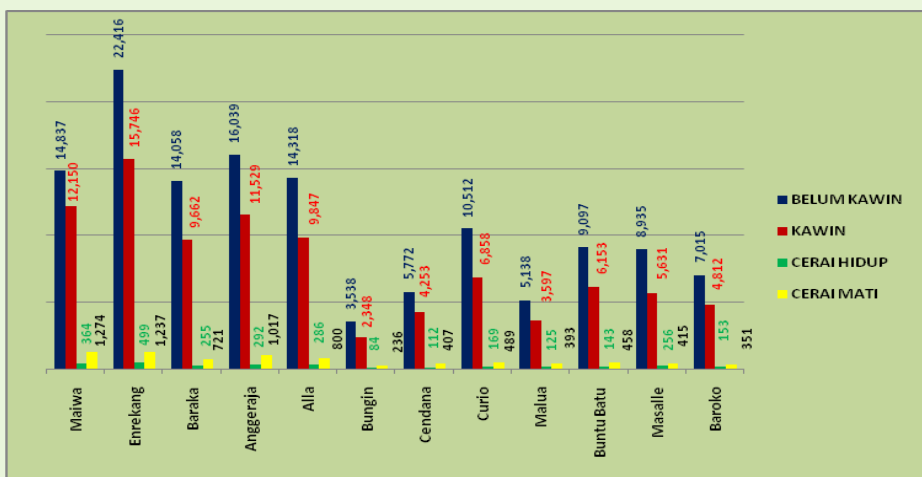
Grafik 12. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kab. Enrekang



Sumber data : Dukcapil Kab. Enrekang

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk Enrekang yang belum menikah sebesar 131,675 jiwa, yang kawin 92,586 jiwa, yang cerai hidup 2,738 jiwa dan cerai mati 7,798 jiwa.

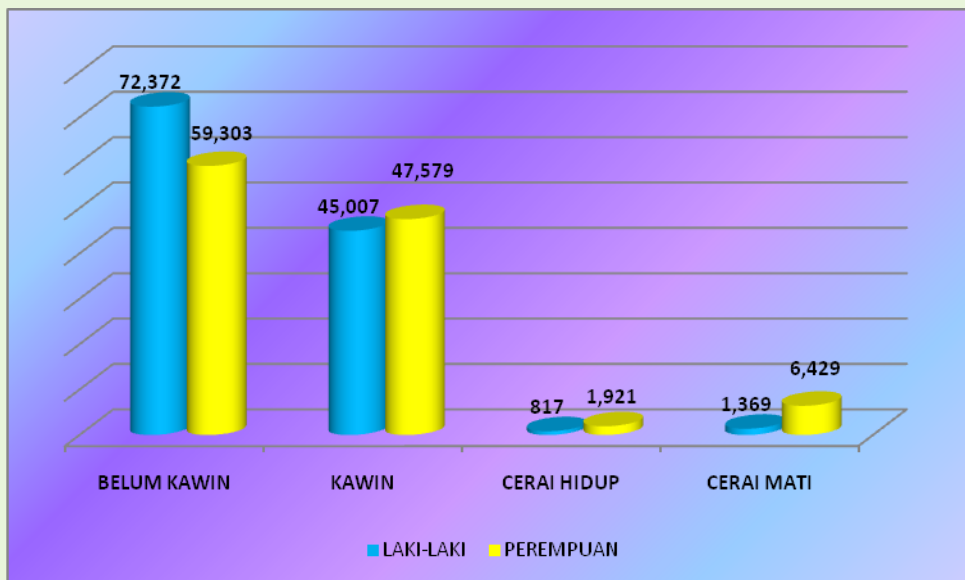
Grafik 13. Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Status Perkawinan di Kab. Enrekang



Sumber data : Dukcapil Kab. Enrekang

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa penduduk yang belum kawin tertinggi pada Kecamatan Enrekang yaitu sebesar 22,416 jiwa, terendah di Kecamatan Bungin sebesar 3,538 jiwa. Kemudian jumlah penduduk yang kawin terbanyak di Kecamatan Enrekang sebesar 15,746 jiwa dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 2,348 jiwa. Penduduk dengan cerai hidup terbanyak di Kecamatan Enrekang sebesar 499 jiwa dan terendah di Kecamatan Bungin 84 jiwa. Penduduk dengan cerai mati terbanyak di Kecamatan Maiwa sebesar 1,274 jiwa dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 236 jiwa.

Grafik 14. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Dukcapil Kab. Enrekang

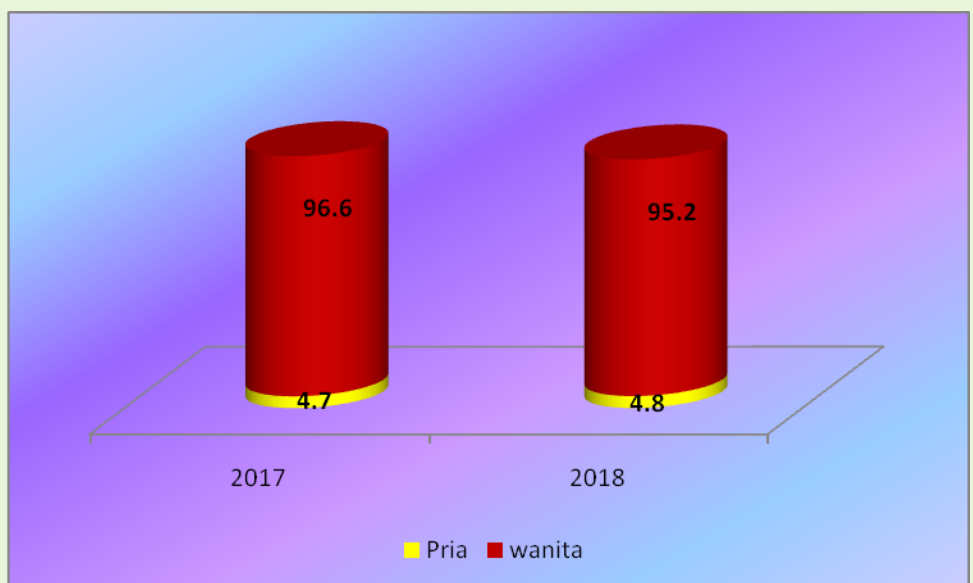
Peserta KB Aktif

Definisi Keluarga Berencana menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami/istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol

waktu kelahiran dalam hubungan dengan suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Sedangkan berdasarkan menurut Undang-undang (UU) No. 52 tahun 2009 pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelayanan program KB terintegrasi dengan kegiatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan dan kesetaraan gender sebagai salah satu upaya pemecahan masalah hak-hak reproduksi kepada masyarakat.

Grafik 15. Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang



Sumber data : Dinkes Kab. Enrekang

Pada grafik 15 di atas terlihat dengan jelas bahwa adanya peningkatan persentase peserta KB aktif wanita dan sebaliknya persentase peserta pria semakin menurun dari tahun 2017 dan 2018, pada Tahun 2017 peserta KB aktif wanita sebesar 96,9 % atau sebanyak 15,377 PA wanita dari total 16,134 PA dan peserta KB aktif

pria hanya sebesar 4,7 % atau sebanyak 757 akseptor dari total akseptor. Selanjutnya pada tahun 2018 peserta KB aktif wanita sebesar 95,2 % atau 15,136 akseptor dari total 15,897 akseptor dan peserta KB aktif pria sebanyak 4, 8 % atau 761 akseptor dari total 15,897 akseptor KB aktif.

Hal ini menunjukkan adanya isu gender dalam program KB bahwa hampir sebagian besar akseptor KB aktif didominasi oleh wanita, rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- 1) Akses pria terhadap informasi dan pelayanan KB masih sangat terbatas
- 2) Masih dominannya suami dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi
- 3) Belum maksimalnya dukungan jenis alat kontrasepsi untuk pria, sampai saat ini hanya tersedia dua jenis yaitu kondom dan MOP. Untuk penggunaan kondom, angka keberlangsungan pemakaiannya masih rendah karena bukan merupakan metode kontrasepsi jangka panjang
- 4) Adanya perspektif sosial budaya salah satunya tentang persepsi apabila menggunakan alat kontrasepsi akan menurunkan kejantanan.

KETIMPANGAN GENDER DI PASAR KERJA

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat merugikan kerugian baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan suatu negara. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat beberapa indikator ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin. Sebagai contoh, proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian berdasarkan jenis kelamin, upah rata-rata pekerja perempuan dan laki-laki, dan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender, khususnya di bidang ketenagakerjaan memiliki peran dalam perekonomian nasional.

Berbicara mengenai ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja, tentu tidak lepas dari kendala norma, keyakinan, peraturan, dan hukum yang berlaku dimasyarakat. Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja sebenarnya merupakan hasil dari persepsi masyarakat umum tentang pemisahan peran, tugas, dan pekerjaan yang dipandang cocok dan wajar dikerjakan oleh perempuan. Perempuan identik dengan sektor domestic atau yang berhubungan dengan kegiatan di dalam rumah tangga, misal mencuci,

memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan sebagainya. Karena anggapan yang demikian, perempuan memiliki akses yang terbatas ke sumber daya, seperti pendidikan, pelatihan, kontak sosial, layanan pemerintah, dan permodalan.

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Akhir-akhir ini topik mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan suatu hal penting. Indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja serta elastisitasnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka ini perlu dicermati, karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Grafik 16. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan, Tahun 2012-2018 (Periode Agustus 2018) (%)

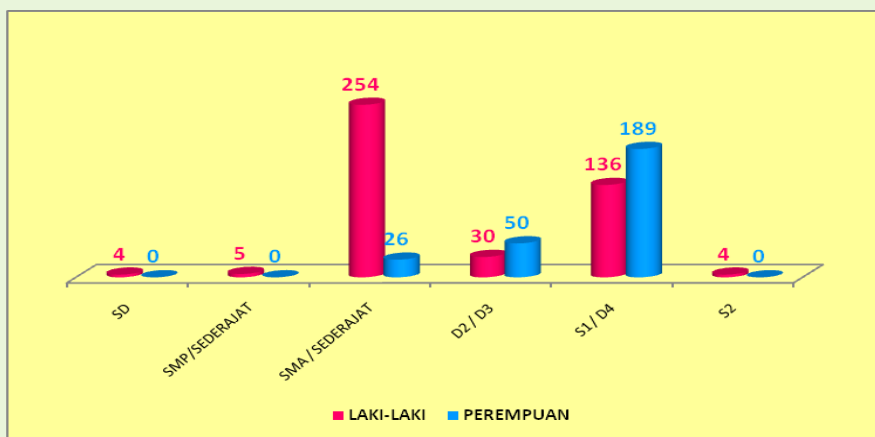


Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor sosial dan budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit masuk ke sektor formal, diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan antara lain: marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial budaya, stereotip terhadap perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah (Khotimah, 2009).

Terdapat perkembangan positif dalam kesetaraan gender di sektor tenaga kerja, dimana jumlah penduduk perempuan bekerja semakin banyak dibandingkan jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan terjadi peningkatan akses dan partisipasi perempuan di dunia kerja di ranah publik.

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga masih jamak di masyarakat.

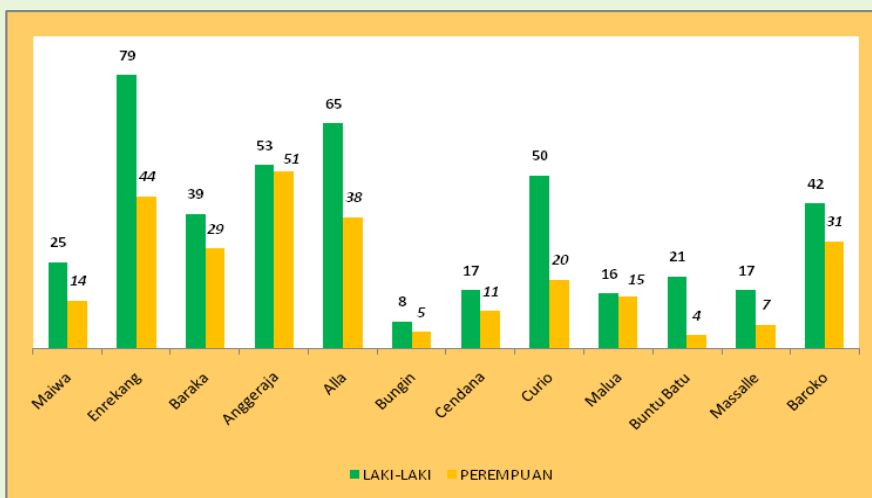
Grafik 17. Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Disnaker Kab. Enrekang

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja terbanyak adalah laki-laki dari pendidikan SMA dan sederajatnya. Pada pendidikan D2/D3e dan S1/D4 pencari kerja perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Grafik 18. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Disnaker Kab. Enrekang

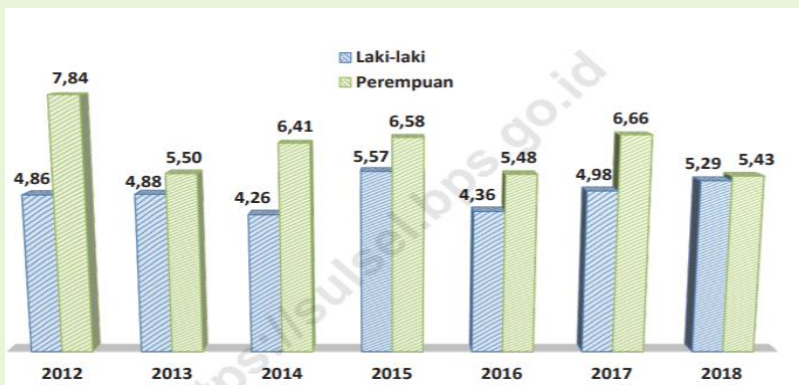
Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa pencari kerja terbanyak adalah dari Kecamatan Enrekang sebanyak 123 orang dengan rincian laki-laki 79 orang dan perempuan 44 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi semua penduduk yang masuk dalam angkatan kerja namun tidak punya pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Berkebalikan dengan partisipasi angkatan kerja, TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup jauh perbedaannya, dimana laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, persentase pengangguran justru lebih dominan perempuan. Fenomena ini menunjukkan kesempatan dan peluang kerja bagi perempuan masih belum terbuka lebar.

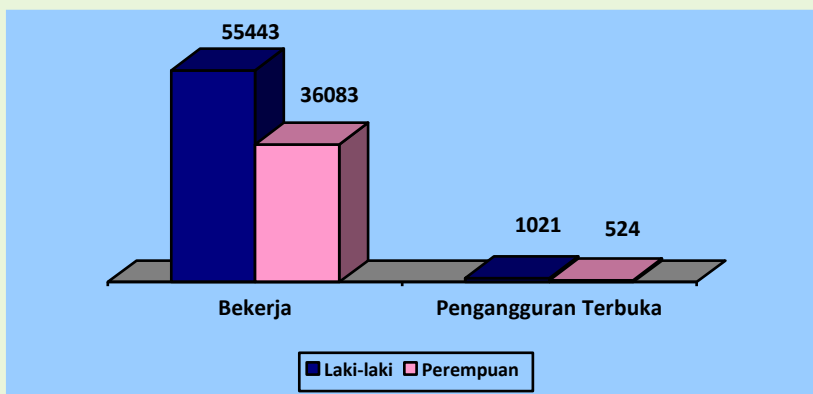
Ditinjau dari jenis kelamin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Saat ini, tingkat pengangguran terbuka perempuan mengalami peningkatan dibandingkan pekerja laki-laki yang terus menurun selama tiga tahun terakhir.

Grafik 19. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2018 (Periode Agustus) (%)



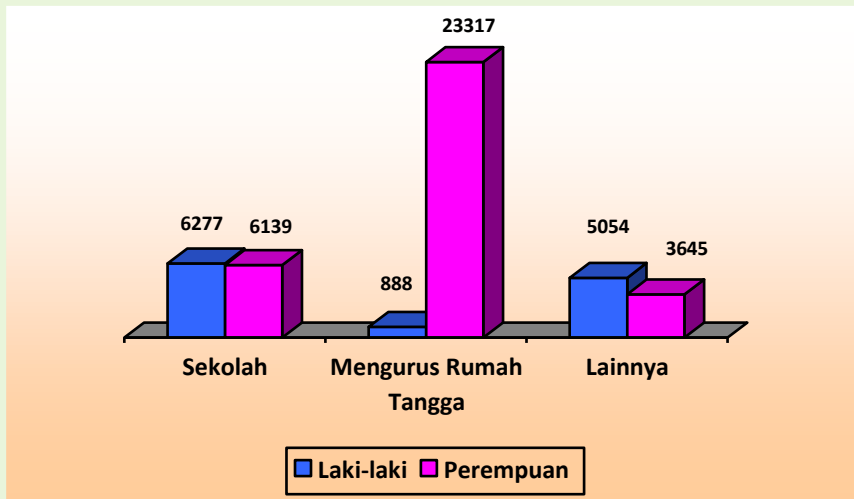
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2018

Grafik 20. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : BPS Kab. Enrekang (Kab. Enrekang Dalam Angka)

Grafik 21. Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : BPS Kab. Enrekang (Kab. Enrekang Dalam Angka)

PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif

Indeks Pemberdayaan Gender dibangun oleh tiga dimensi, dimensi pertama yaitu indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Meskipun dunia politik di Indonesia masih di dominasi oleh kaum laki-laki, namun angka indeks keterwakilan perempuan periode 2010 hingga 2017 terus mengalami kenaikan. Penurunan terjadi di tahun 2018, dimana indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen turun 2,13 poin persen, dari 21,18 persen di tahun 2017 menjadi 19,05 persen di tahun 2018.

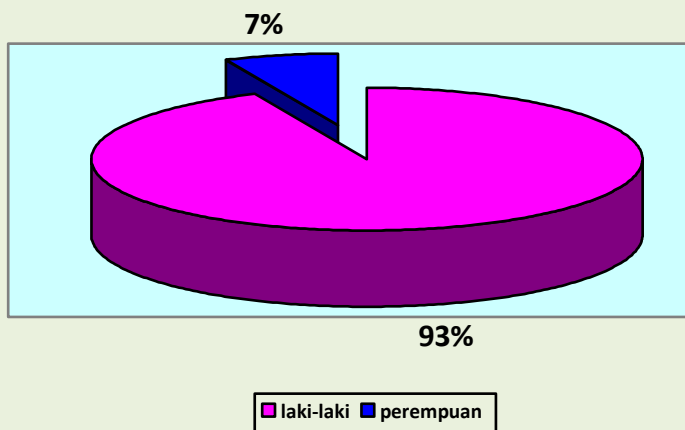
Grafik 22. Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2018



Sumber : www.bps.go.id

Jika dilihat dari total persentase anggota DPRD laki-laki dan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen jauh lebih rendah dibanding laki-laki.

Diagram 1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Menurut Jenis Kelamin Periode Tahun 2019-2024

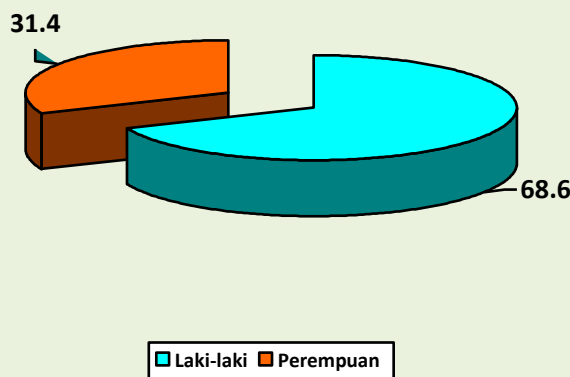


Sumber Data : Sekwan Kab. Enrekang

Sebaran keterwakilan perempuan di seluruh Kabupaten/Kota bervariasi, jika kita membagi perolehan kursi keterwakilan berdasarkan kategori rendah (0-19%), kategori sedang (20-29%) dan kategori tinggi (>30%) maka akan terlihat gambaran keterwakilan perempuan di Kabupaten Enrekang berdasarkan 3 (tiga) kategori tersebut maka terlihat bahwa Kabupaten Enrekang berada pada kategori rendah (0-19%). Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Untuk menarik minat kaum perempuan berkiprah di bidang politik dapat dimulai dari keaktifan perempuan menjadi pengurus parpol atau menjadi anggota parpol.

Diagram 2. Persentase Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Enrekang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2024



Sumber Data : KPU Kab. Enrekang

Hal tersebut diatas menunjukkan minat perempuan ataupun kemampuan perempuan dalam kepengurusan parpol dapat menjadi motivasi dan pembelajaran dalam mengikuti pemilihan calon legislative baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

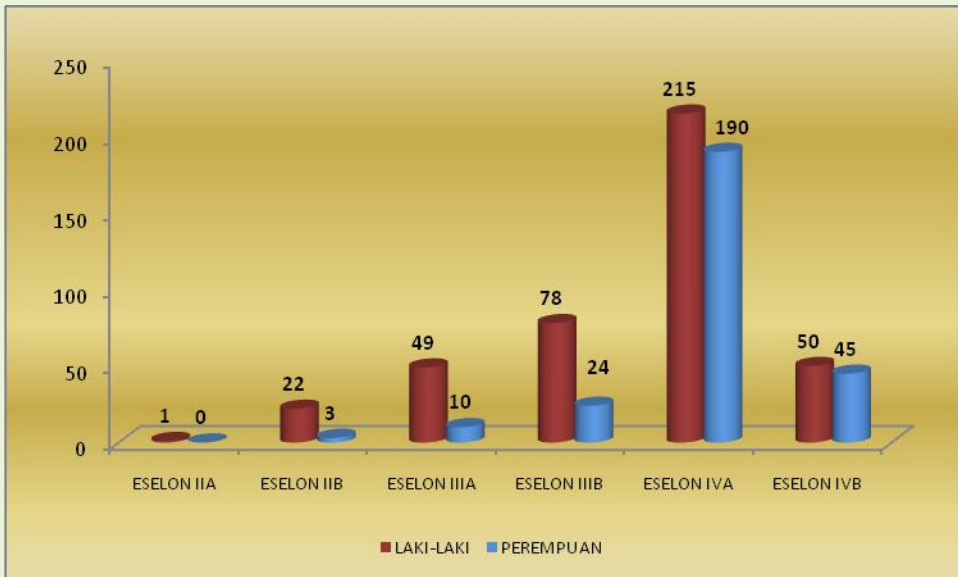
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang penting, dan bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang untuk menjadi pemimpin terbuka bagi seorang perempuan, dan perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, data secara umum menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di lembaga eksekutif masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Di Kabupaten Enrekang, persentase perempuan di jabatan eselon II 8,33 %, Eselon III 24,62 % dan Eselon IV 45,52% pada tahun 2017. Pandangan

awam tentang kepemimpinan, nampaknya masih diwarnai oleh budaya patriarkhi, dan hal ini masih cukup kental member warna dalam penentuan jabatan tertentu terutama di level eselon II, III, dan IV.

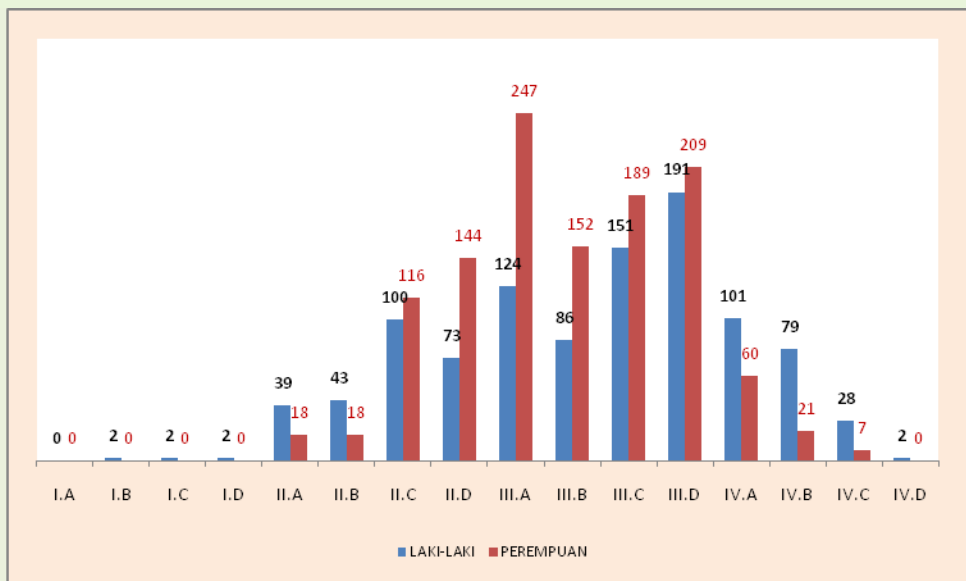
Grafik 23. Jumlah Pejabat yang Menduduki Jabatan Eselon II-IV Menurut Jenis Kelamin di Lingkup Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : BKDD Kab. Enrekang 2018

Lebih lanjut data tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pejabat eselon II sampai dengan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang, masih menunjukkan adanya kesenjangan gender. Kecenderungan yang terlihat adalah semakin tinggi eselon semakin tinggi kesenjangan jumlah perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan tersebut.

Grafik 24. Jumlah Pejabat Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Lingkup Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : BKDD Kab. Enrekang

KETIMPANGAN GENDER DI SEKTOR EKONOMI

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Hubungan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi berlangsung melalui dua jalur. **Jalur pertama**, melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Besarnya pengeluaran tersebut merupakan indikasi tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. **Jalur kedua**, melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga, dalam hal ini besarnya dan komposisi untuk nutrisi keluarga, biaya pelayanan kesehatan, dan pendidikan anggota rumah tangga. Jembatan yang menghubungkan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi adalah melalui penciptaan kesempatan kerja.

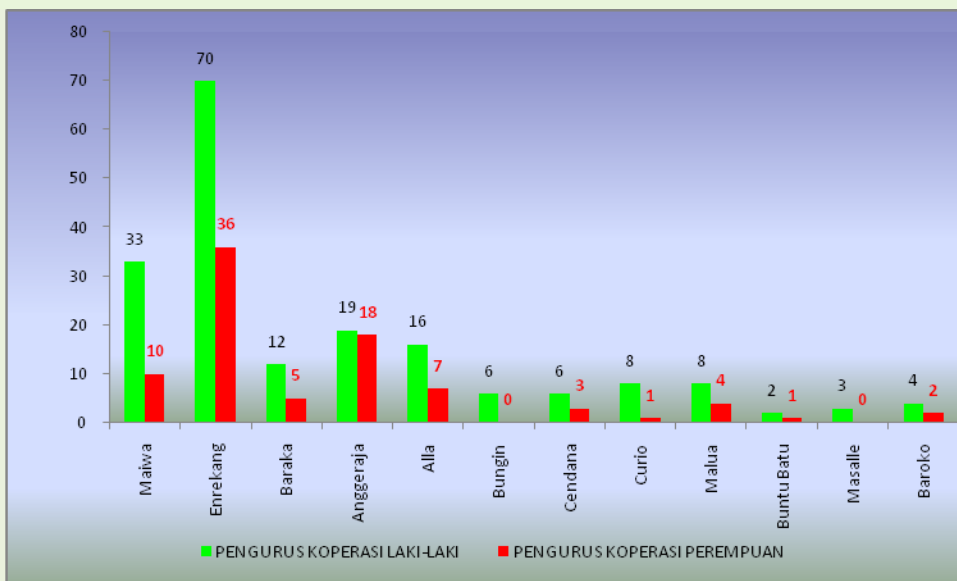
Dalam kerangka ketahanan ekonomi keluarga, perempuan sangat berpotensi untuk menciptakan berbagai kegiatan yang produktif yang dapat membantu ekonomi keluarga. Dengan potensi tersebut perempuan dapat berperan dalam pemulihan ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan. Saat ini berwirausaha menjadi pilihan perempuan untuk dapat bekerja membantu perekonomian keluarga. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga menjadi sangat penting mengingat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara merata dan maksimal. Salah satu fokus pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan

tersebut dengan cara mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi.

Ketimpangan Gender di Sektor Koperasi dan UMKM

Secara umum, jumlah keanggotaan dan pengelola Koperasi di Kabupaten Enrekang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017, laki-laki (58,86 %) dan perempuan (41,14 %). Artinya untuk level pengambil keputusan pada internal koperasi (pengurus dan pengawas), perempuan belum mempunyai peran yang signifikan. Walaupun dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan jumlah perempuan menjadi pengurus dan pengawas koperasi, namun belum maksimal. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh karena mulai timbul kesadaran di kalangan perempuan untuk berpartisipasi meningkatkan ekonomi keluarga, mereka bekerja secara informal di rumah, berusaha menyeimbangkan antara beberapa tanggung jawab dan kendala yang ada dihadapi dalam aktifitas publik.

Grafik 25. Jumlah Pengurus Koperasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2017



Sumber data : Dinas Kop. UKM Kab. Enrekang

Kecenderungan tingginya minat laki-laki untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi dibandingkan dengan perempuan, bisa disebabkan oleh faktor antara lain ;

(a) faktor sosial budaya, dimana masih ada anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah dan mempunyai aktifitas di luar rumah, perempuan *sering emosional dan sentimental* dalam situasi yang tidak tepat, sehingga banyak perempuan menghabiskan waktu memikirkan "apa kata orang nanti" dan sering menanam "perasaan tidak enak" secara berkepanjangan, ,

(b) kurangnya peluang dan kesempatan yang dimanfaatkan oleh perempuan untuk mengaktualisasikan diri oleh karena adanya anggapan bahwa, perempuan *tidak terlatih untuk memiliki semangat untuk bersaing, kurang terlatih dalam teamwork*, malah cenderung menghindari konfrontasi, karena konfrontasi bukan sifat kodrati perempuan, perempuan *kurang berani mengambil resiko*, perempuan *kurang cukup agresif*, karena sifat agresif tidak searah dengan pendidikan yang diterimanya selama ini, bahwa perempuan harus feminim, perempuan lebih senang tidak menonjolkan kelebihan pendapat dan kepemimpinannya,

Sebenarnya partisipasi perempuan dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha kerakyakatan sudah ada sejak dulu, yaitu dengan terbentuknya beberapa koperasi wanita di seluruh Indonesia. Bentuk pemberdayaan perempuan dilakukan pada semua jenis koperasi yang khusus, yakni koperasi wanita (Kopwan) yang merupakan wadah paling tepat bagi kelompok perempuan pelaku usaha produktif. Jumlah koperasi , yang terbentuk di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2018 sebanyak 209 buah, yang aktif hanya 80 buah. Dari jumlah koperasi yang ada hanya ada 2 koperasi wanita, 1 di Kecamatan Maiwa dan 1 ada di Kecamatan Malua.

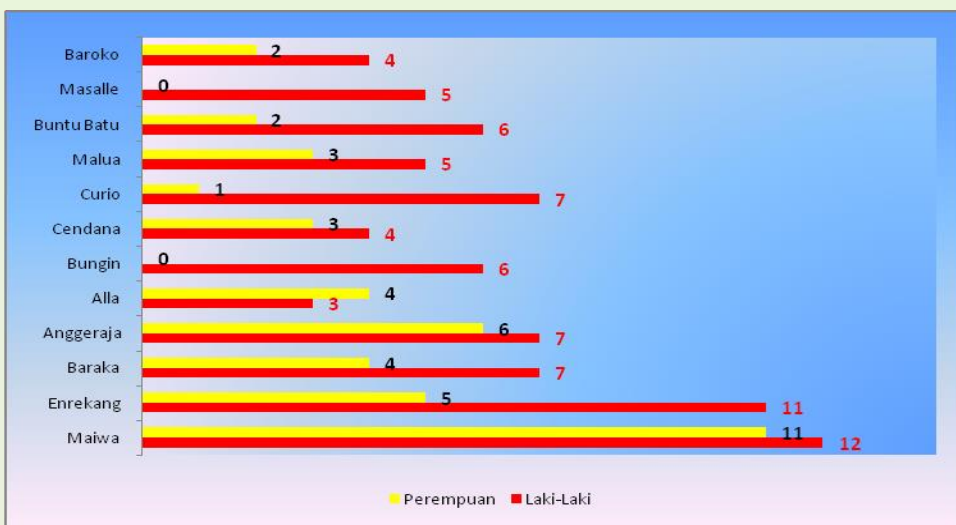
Peran Gender di Sektor Pertanian dan Perkebunan

Banyak masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Enrekang, yang menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan. Selain bertanggung jawab terhadap hajat hidup orang banyak, perkebunan memiliki peranan yang sentral dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan

lapangan pekerjaan, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Salah satu ketimpangan gender yang dihadapi pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari jumlah pendamping pada setiap kecamatan. Pada umumnya, jumlah pendamping untuk pengembangan komoditas pertanian yang ditugaskan di kecamatan masih didominasi oleh penyuluh laki-laki. Jika dicermati tugas dan peran yang harus dilakukan oleh penyuluh pertanian kecamatan, sepanjang jaminan keselamatan dan fasilitas lapangan dipenuhi oleh pemerintah, maka tidak ada hambatan bagi perempuan untuk menekuni pekerjaan sebagai pendamping. Hanya kemudian perlu dijadikan pertimbangan jika jangkauan medannya cukup berbahaya, maka seyogyanya penyuluh perempuan tidak diberikan tugas di wilayah seperti ini. Hal seperti ini perlu dipertimbangkan mengingat adanya perbedaan kebutuhan terkait kesehatan reproduksi perempuan, utamanya terkait peran gender berdasarkan kodrat perempuan.

Grafik 26. Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun 2018



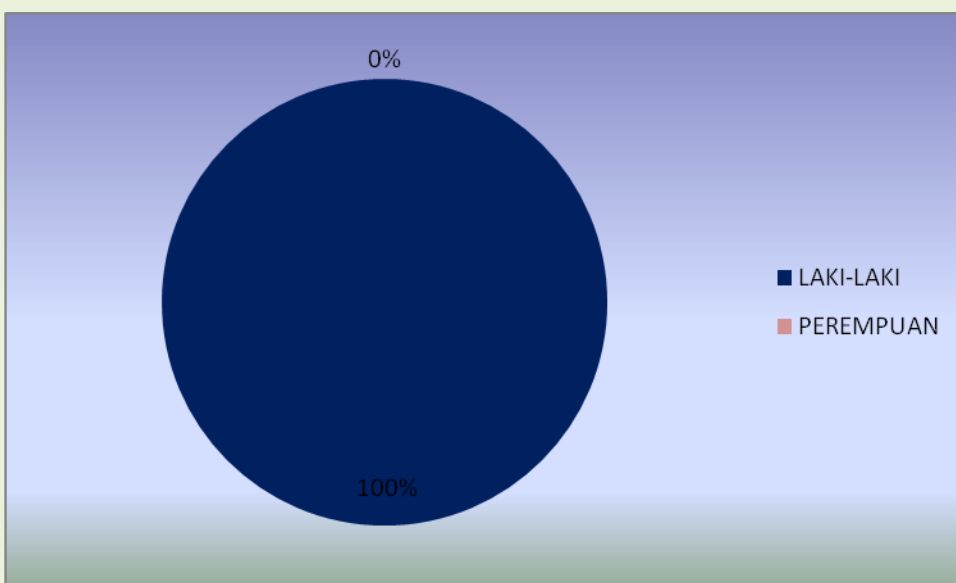
Sumber Data : Dinas Pertanian Kab. Enrekang

Berdasarkan grafik di atas penyuluh pertanian terbanyak ada di Kecamatan Maiwa dimana kelihatan hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan Peran Gender di Sektor Peternakan dan Perikanan

Usaha peternakan merupakan salah satu jenis usaha yang bisa dilakukan secara mandiri oleh laki-laki dan perempuan, baik usaha ternak kecil, sedang, ataupun besar, dalam skala kecil maupun besar. Namun dalam kenyataannya, di Kabupaten Enrekang usaha di sektor peternakan masih didominasi oleh laki-laki.

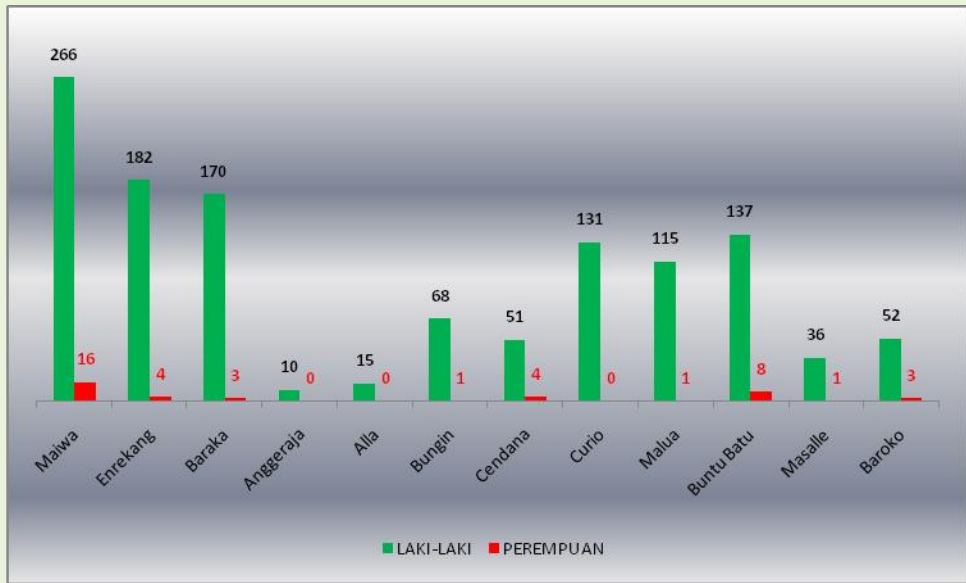
Diagram 3. Persentase Pelaku Usaha Peternakan Menurut jenis Kelamin di Kab. Enrekang, Tahun 2018



Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Enrekang

Kesenjangan gender di sektor usaha peternakan nampak pada beberapa aktifitas, utamanya dalam proses pengambilan keputusan yang relatif rendah. Mulai dari keputusan untuk menjual ternak, membeli ternak, maupun menentukan harga ternak, lebih didominasi laki-laki.

Grafik 27. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Enrekang

Berdasarkan grafik di atas, menggambarkan bahwa pelaku usaha perikanan terbanyak ada di Kecamatan Maiwa sedangkan pelaku usaha perikanan terkecil ada di Kecamatan Anggeraja. Tapi dari semua kecamatan hampir didominasi oleh laki-laki.

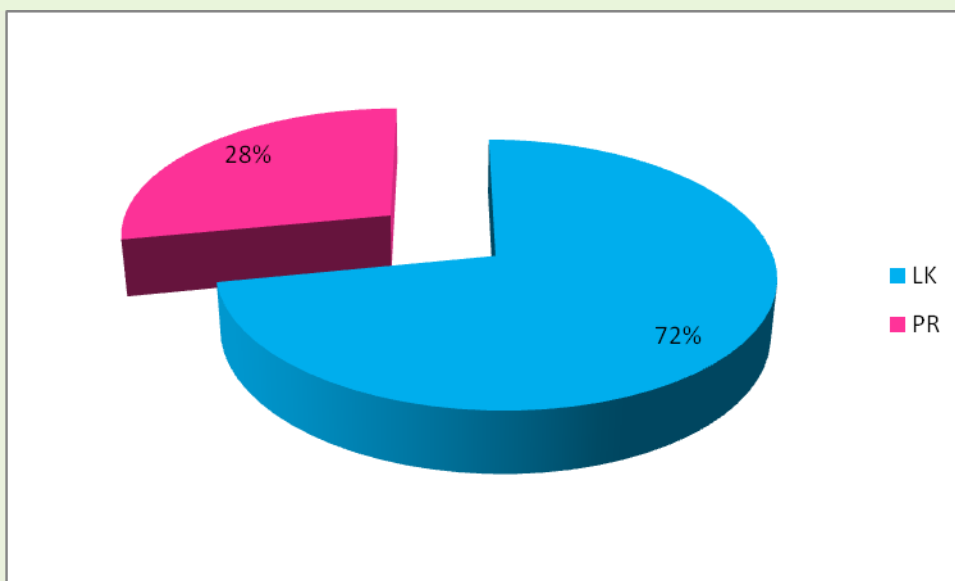
Kecenderungan ini diwarnai oleh pembagian peran gender, dimana laki-laki lebih banyak beraktifitas di kegiatan penangkapan ikan, dan perempuan di pengolahan. Disinilah terlihat peran perempuan dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga nampak jelas terlihat ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal peningkatan ekonomi keluarga juga dalam peningkatan pembangunan perikanan.

Selanjutnya, pada kegiatan pemasaran hasil perikanan terjadi pula pembagian peran gender, yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki sekarang dilakukan pula oleh kaum perempuan.

Ketimpangan Gender di Sektor Perindustrian dan Perdagangan dan Sektor Tenaga Kerja

Pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan bisa dikatakan menjadi pengungkit keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, memperkuat dan menjamin efektifitas perencanaan dan penganggaran sektor perindustrian dan perdagangan menjadi sangat penting. Untuk memastikan efektifitas pelaksanaan pembangunan di sektor perdagangan, pendekatan perencanaan responsive gender menjadi salah satu pilihan untuk menghasilkan pembangunan yang optimal, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah good governance bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki.

Diagram 4. Jumlah Pelaku Usaha Industri Menurut Jenis Industri dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



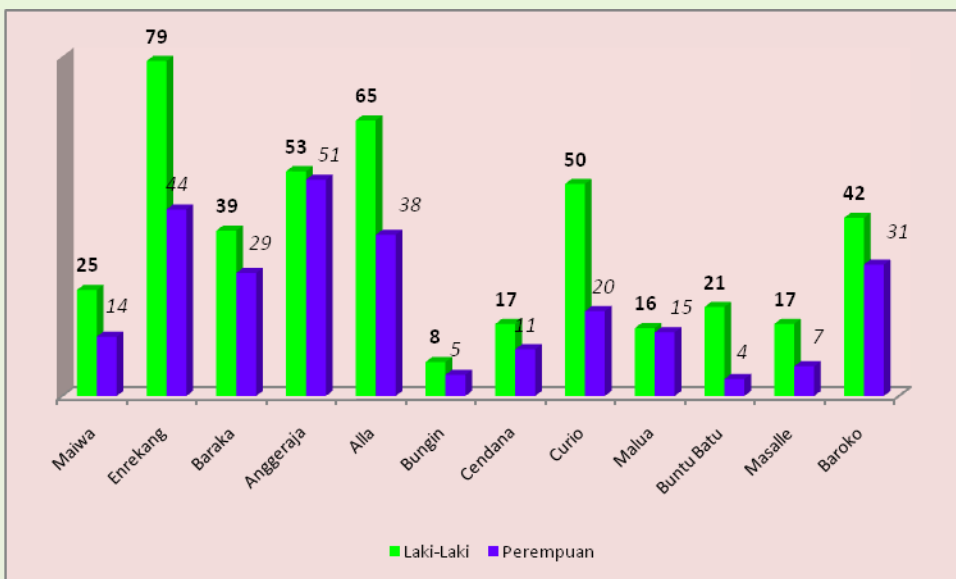
Sumber data : Disperindag Kab. Enrekang

Berdasarkan laporan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, ada 432 jumlah pencari kerja laki-laki dan 269 jumlah pencari kerja perempuan pada tahun 2018. Data ini member

gambaran bahwa di sektor tenaga kerja, jumlah pencari kerja laki-laki masih sangat tinggi dibandingkan perempuan.

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga masih jamak di masyarakat. Secara gender, mencatat hanya sekitar 38 persen perempuan yang siap dalam dunia kerja. Sementara laki-laki sudah mencapai sekitar 62 persen. Ternyata dunia kerja masih di dominasi laki-laki.

Grafik 28. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Dinas Koperasi,UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Enrekang

KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender di daerah. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya. Pada umumnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin senjang pula capaian laki-laki dan perempuan. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa hal. Budaya yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dibandingkan perempuan masih terdapat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kewajiban laki-laki untuk menghidupi keluarga dengan mencari nafkah mengharuskan laki-laki mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Salah satu ukuran untuk mengetahui kesempatan pendidikan adalah dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar. Angka partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. APK melihat murid yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Semisal nilai APK SD/ sederajat sebesar 108,87 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat, ada sekitar 8,87 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa yang masih sekolah di

SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase penduduk yang duduk dibangku sekolah semakin rendah. Hal yang perlu diperhatikan adalah partisipasi pendidikan usia dini, baru mencapai 65,71 persen. Masih perlu komitmen yang lebih tinggi lagi untuk memberikan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, dengan kemudahan akses di seluruh wilayah.

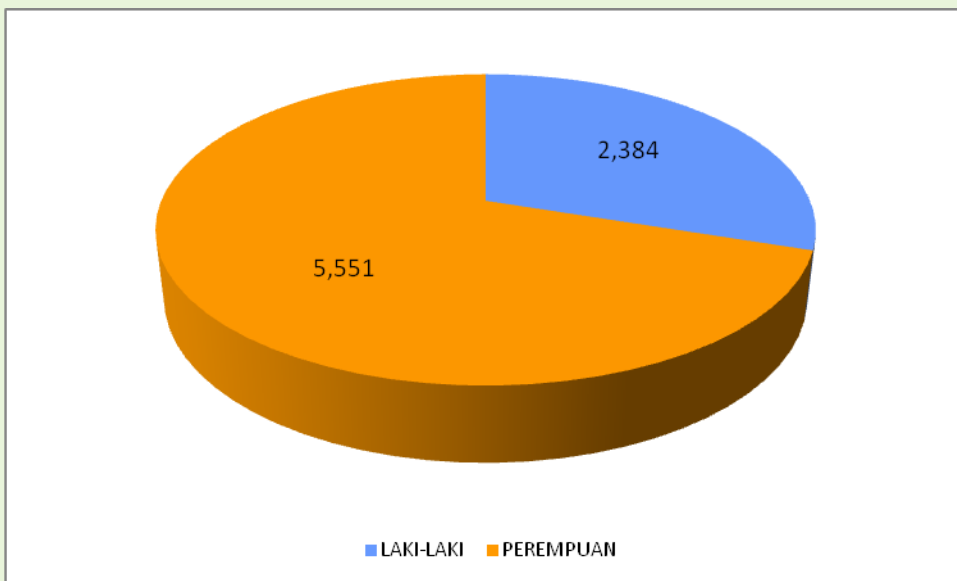
Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 (%)

	7-12 th	13-15 th	16-18 th
Laki-laki	99,07	91,28	66,91
Perempuan	99,44	94,92	74,87
Total	99,25	93,13	70,81

Literasi Perempuan

Pendidikan masyarakat dapat pula diakses melalui jalur non formal dengan memanfaatkan lembaga layanan perpustakaan. Peningkatan pengetahuan masyarakat dapat ditunjang dengan hadirnya perpustakaan yang menyediakan buku-buku sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan strategis. Berdasarkan data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, terdapat jumlah pengunjung dari tahun 201 ke tahun 2016. Jika dicermati menurut jenis kelamin, nampak atensi perempuan terhadap pentingnya literasi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan pengetahuan melalui perpustakaan di tengah masyarakat kita masih cukup tinggi meskipun saat ini teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mencari berbagai informasi.

Diagram 5. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Jenis Kelamin di Perpustakaan Kab. Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Enrekang

PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

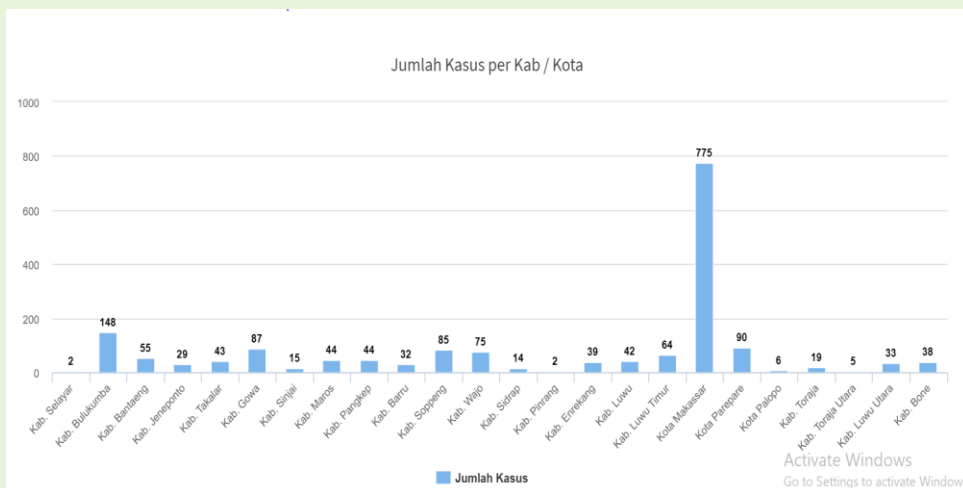
Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, yang dapat merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu masalah global dan erat dengan hak asasi manusia terutama perempuan.

Data kekerasan terhadap perempuan selama ini hanya berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, seperti gunung es, yang hanya terlihat puncaknya saja. Meskipun demikian, data ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan upaya pencegahan yang harus dilakukan, untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan yang dialami juga tidak hanya fisik, tetapi juga seksual. Perempuan mengalami empat jenis kekerasan yang sering dialami yakni, ditampar, dipukul, didorong atau dijambak, ditendang dan dihajar. Sedangkan kekerasan seksual yang menimpa perempuan yang paling banyak terjadi pada pasangan antara lain, pemaksaan hubungan secara fisik, baik dengan tindakan mengancam atau dengan cara merendahkan.

Hasil survey nasional ini, sejalan dengan data pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), pada tahun 2018 terdapat 1786 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 1374 orang.

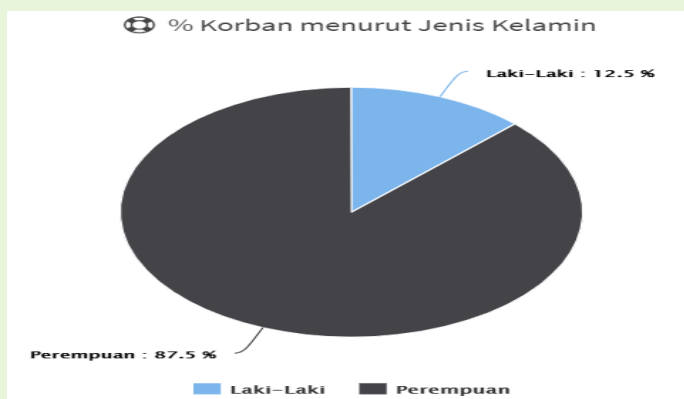
Grafik 29. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten di Sulawesi Selatan, Tahun 2018



Sumber: Aplikasi Simfoni DPPPA Kab Enrekang

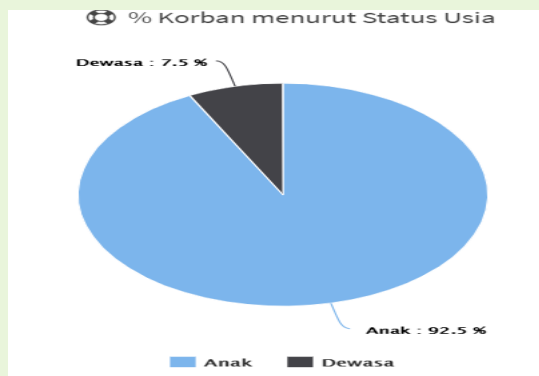
Berdasarkan grafik di atas, korban kekerasan di Kabupaten Enrekang sebanyak 39 kasus dari 1876 jumlah kasus yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 meningkat dari 1514 kasus pada tahun 2017. Tetapi dari jumlah kasus yang ada belum mencakup semua kasus yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih ada kasus yang tidak dicatat dalam Sistem Informasi Online Kasus Kekerasan pada perempuan dan anak.

Diagram 6. Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Simfoni PPA Dp3A Kab. Enrekang

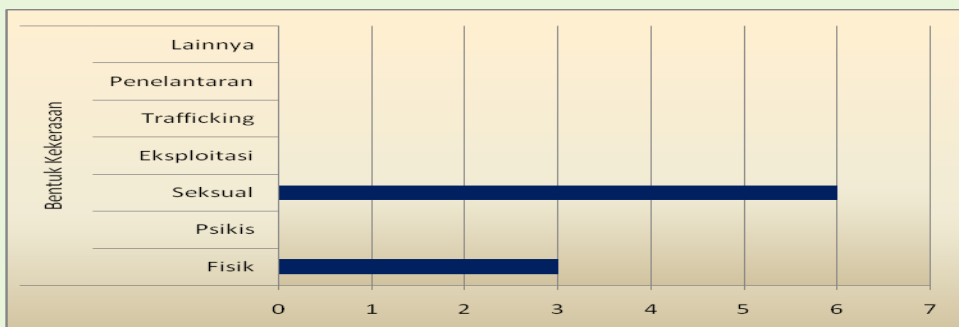
Diagram 7. Persentase Korban Kekerasan Menurut Status Usia di Kabupaten Enrekang Tahun 2018



Sumber data : Simfoni PPA Dp3A Kab. Enrekang

Jika dilihat berdasarkan status usia, korban kekerasan lebih banyak terjadi pada anak-anak yaitu 92,5 persen.

Grafik 30. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Bentuk Kekerasan di Kab. Enrekang, Tahun 2018



Sumber data : Simfoni PPA Dp3A Kab. Enrekang

Berdasarkan grafik di atas, kekerasan yang terjadi pada perempuan lebih banyak pada kekerasan seksual dan fisik. Memperhatikan data tersebut sudah seharusnya pemerintah mempunyai strategi yang handal untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan. Lemahnya penegakan hukum, kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan impunitas bagi pelaku akan membuat kasus kekerasan terus berulang. Hal inilah yang menjadi penting untuk dituntaskan.

BAGIAN



PROFIL ANAK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian nasional, tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan kualitas hidup manusianya. Secara umum pencapaian pembangunan kapabilitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan yang nyata. Namun, apakah pembangunan kapabilitas manusia di Indonesia ini telah memberikan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan? Apakah masih ada kesenjangan pencapaian pembangunan kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

Dalam konteks pembangunan kualitas manusia secara utuh, anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Publikasi ini mencoba memberikan gambaran data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan 5 (lima) kluster Konvensi Hak Anak, tertuang secara runtut dalam setiap bab, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang.

Profil anak ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan, dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak di Kabupaten Enrekang.

Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi tentang kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang.

Sumber Data

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus serta Data Sektoral

Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam bab disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus.

STRUKTUR PENDUDUK USIA ANAK (0 – 17 TAHUN)

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Jumlah penduduk usia anak di Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 mencapai jumlah 86.599 jiwa dari total penduduk 204.827 atau sebanyak 42,28 persen. Jumlah ini relatif cukup besar, dan merupakan potensi kekuatan bangsa jika Negara berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selanjutnya, jika dilihat perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan, nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak adalah 105,72 artinya setiap 100 anak perempuan terdapat sekitar 105-106 anak laki-laki. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting,

seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan.

Tabel 2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	34279	32424	105.72
15-64	61367	61013	100.60
65+	7173	8571	83.70
Total	102819	102008	100.80

Sumber data: Enrekang dalam angka 2019, BPS ,Diolah

Bila dilihat pada kelompok usia muda (0-14) dan kelompok usia sedang (15-64) sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok penduduk tua (65+) sex ratio dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur yang demikian kelihatan mengikuti pola universal (Barclay, 1985, *dikutip dari Inkesra Sulsel 1995*). Pada umumnya kelahiran anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan. Namun demikian angka kematian laki-laki juga lebih tinggi dibanding perempuan dan perbedaannya semakin tinggi menurut kelompok umur, sehingga keadaan inilah yang menyebabkan jumlah laki-laki pada usia muda lebih banyak dibanding perempuan dan sebaliknya penduduk perempuan lebih tinggi pada kelompok usia sedang dan usia tua.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Enrekang Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki_laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	11487	10972	22459
2	5-9	11589	10932	22521
3	10-14	11203	10520	21723
4	15-19	9941	8629	18570
5	20-24	6866	6197	13063
6	25-29	7069	6889	13958
7	30-34	6946	6919	13865
8	35-39	6686	6731	13417
9	40-44	6.300	6.235	12.535
10	45-49	5642	5740	11382
11	50-54	4799	5357	10156
12	55-59	3865	4360	8225
13	60-64	3253	3956	7209
14	65+	7174	8570	15744
Jumlah		102820	102007	204827

Sumber data : BPS Enrekang , Proyeksi Penduduk Indonesia

Pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Enrekang yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 102.820 dan yang berjenis kelamin perempuan mencapai 102.007 (Tabel 2 .2). Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan, maka

sepertiga dari penduduk Enrekang masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Pada Tabel 2.1 tampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) untuk Laki-laki dan Perempuan sebesar 100,80 yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik.

Penduduk suatu daerah dikatakan berstruktur muda apabila persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun lebih dari 40 persen. Dengan mengamati piramida penduduk tampak bahwa penduduk Kabupaten Enrekang tergolong berstruktur sedang, sebab besarnya persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun berada di bawah 40 persen, yaitu sebesar 32,84 persen. Meskipun komposisi penduduk muda mengalami penurunan namun komposisi penduduk usia produktif mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebesar 59,62 persen. Ini dikarenakan pada periode sebelumnya angka fertilitas cenderung tinggi.

Selanjutnya struktur umur dapat digunakan pula untuk mengetahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk yang produktif secara ekonomis (usia 15-64 tahun). Semakin besar persentase penduduk yang berusia non produktif, maka makin besar pula angka beban ketergantungannya.

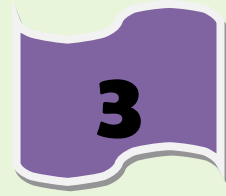
Berdasarkan perbandingan tersebut diperoleh angka beban ketergantungan tahun 2018 adalah sebesar 67,80 persen. Ini jauh berbeda angkanya jika dibandingkan pada tahun 2004 yaitu sebesar 73,91 persen. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa dari setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Enrekang harus menanggung sekitar 67 sampai 68 penduduk tidak produktif untuk tahun 2018

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar, misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak, baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya mengingat kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya. Di bidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan, disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orang tua.

Bonus Demografi

Dampak sukses dari pembangunan kependudukan dan kesehatan adalah menurunnya jumlah kelahiran, jumlah kematian dan meningkatnya harapan hidup penduduk. Menurunnya jumlah kelahiran dan kematian dalam

jangka panjang akan menyebabkan perubahan struktur penduduk, yaitu turunnya proporsi jumlah anak dan meningkatnya proporsi usia produktif. Di sisi lain, meningkatnya harapan hidup penduduk dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat akan berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Perubahan struktur penduduk tersebut akan menyebabkan turunnya beban ketergantungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.



HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Hak Atas Kepemilikan Akta Kelahiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Negara wajib member perlindungan dan pengakuan status seluruh penduduknya. Tanggungjawab tersebut mencakup status hukum penduduk yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan RI. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) juga dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal.

Peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian) dan peristiwa penting lainnya harus dicatat karena membawa implikasi perubahan data identitas kependudukan. Peristiwa tersebut, perlu bukti sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan bukti sah kependudukan, setiap warga Negara akan memperoleh hak dan kewenangannya. Selain itu, diharapkan warga Negara tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait status kependudukannya.

Anak, sebagai salah satu bagian atau elemen dari penduduk juga harus memiliki catatan kependudukan yang baik dan tertib hukum. Menurut konvensi tentang hak-hak anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali mereka dianggap dewasa lebih awal karena undang-undang yang berlaku. Berdasarkan UU dan peraturan yang ada,

setiap anak seharusnya memiliki akte kelahiran sebagai salah satu dokumen penting kependudukannya.

Permendagri nomor 9 tahun 2016 menyebutkan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh setiap penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak. Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak serta wujud pengakuan Negara atas identitas anak. Akta kelahiran merupakan akta yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan dan merupakan dokumen resmi Negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak.

Tabel 4. Jumlah Anak Berumur 0-18 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, Tahun 2016 - 2018

No	Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil		
		Memilik	Tidak	Jumlah
1.	2016	1	—	12337
2.	2017	473	35243	82603
3.	2018	56616	29983	86599

Sumber data : Disdukcapil dan Enekan Dalam Angka ;diolah

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, masih ada sekitar 34 persen anak usia 0-18 tahun di Kabupaten enekang yang tidak tahu/ tidak memiliki akta kelahiran. Dan dalam dua tahun terakhir, persentase tersebut turun dari 42 persen pada tahun 2017.

Diagram 8. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Kabupaten Enrekang, Tahun 2018



Sumber data : Profil Dinas Dukcapil Kab. Enrekang 2019

Data dari Dinas Dukcapil menunjukkan jumlah anak yang berusia (0-18 tahun) pada tahun 2018 sebesar 86.599. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebesar 56.616 dan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 29.983 atau masih ada sekitar 34 persen anak usia (0-18)tahun di Kabupaten enekang yang tidak tahu/ tidak memiliki akte kelahiran.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Mencermati permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan yang lebih mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akta kelahiran juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan masyarakat. Tanggung

jawab ini diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah karena di dalam akta kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 23/2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

Kepemilikan akte kelahiran pada anak secara tidak langsung mengindikasikan terbukanya akses pelayanan bagi anak. Dengan memiliki akte, seorang anak akan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta jaminan sosial dan perlindungan hak sipil. Bahkan akte kelahiran juga berperan dalam mendapatkan bantuan hukum jika seandainya anak bermasalah dengan hukum.

Bagi pemerintah, kepemilikan akte kelahiran akan memenuhi data statistic terkait data kependudukan anak. Data tersebut menjadi informasi yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dalam pembangunan. Karena akte kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak, maka pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 9 tahun 2016 yang merupakan upaya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran melalui system manual maupun online. Dengan berbagai upaya pemerintah ini, kedepannya diharapkan cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Enrekang pada khususnya dapat mencapai 100 persen. Hal itu akan sangat berpengaruh pada terbukanya akses bagi kehidupan anak, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dengan terbukanya akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang bagi tingkat kesejahteraan anak saat ini maupun dimasa depan. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB

mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara.

PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA

Pengasuhan Alternatif

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini.

Banyaknya kegagalan dalam pengasuhan anak, bukan karena kurangnya kasih sayang orang tua pada anak, melainkan karena sebagian orang tua tidak tahu bagaimana cara mengasuh yang baik dan benar. Padahal orang tua adalah orang yang mempunyai peranan penting dalam proses asuh, asah dan asih bagi anak-anak mereka. Untuk menjadi orang tua yang hebat tentunya tidaklah mudah. Tidak ada kelas khusus secara formal bagi orangtua untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Perhatian terhadap pengasuhan anak terutama bagi anak usia dini 0-6 tahun telah banyak dilakukan oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden no 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini yang mencakup upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kerangka siklus hidup manusia yang dimulai dari dalam kandungan sampai lanjut usia. Untuk itu pembinaannya perlu dilakukan sejak dini sesuai dengan siklus tersebut. Salah satu tahap yang amat penting adalah tahap janin sampai anak berusia 2 tahun.

Parenting Education (PE) merupakan cara terbaik untuk membangun karakter anak melalui kedua orang tuanya. Dari sini anak-anak mulai belajar dan membentuk karakter. Karena itu, para orang tua harus membekali diri dengan Parenting Education. Peran mereka menjadi penting karena sebelum bersekolah anak terlebih dulu mengenal orang tua.

Pendidikan anak usia dini ini sangat penting untuk melengkapi pengasuhan anak dalam keluarga, dan menjadi pengasuhan alternative bagi anak usia 0-5 tahun. Dalam pengasuhan anak usia dini, ada 5 aspek penting yang dikembangkan pada diri anak yaitu :

Kemampuan motorik atau fisik: perkembangan fisik anak dikembangkan termasuk kemampuan motorik kasar seperti olahraga dan motorik halus seperti bermain puzzle, melakukan kerajinan tangan
Kemampuan kognitif: bagaimana anak hidup dalam lingkungannya dan bagaimana untuk memecahkan masalah
Kemampuan sosial: anak belajar berinteraksi dengan orang lain.
Kemampuan emosional: anak mampu mengendalikan emosi dan percaya diri
Kemampuan bahasa: anak belajar berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana menyatakan perasaan dan emosinya melalui bahasa.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu,

peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Tabel 5. Jumlah sekolah dan Murid Taman Kanak- kanak menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2018

KECAMATAN	TK	JUMLAH SISWA		JUMLAH
		L	P	
Maiwa	23	339	318	657
Cendana	9	50	57	107
Enrekang	25	414	350	764
Anggeraja	15	332	326	658
Baraka	27	430	413	843
Malua	9	140	138	278
Buntu Batu	9	104	111	215
Bungin	3	49	43	92
Alla	8	213	212	425
Curio	19	302	278	580
Masalle	0	0	0	0
Baroko	2	21	17	38

Sumber data : Enrekang Dalam Angka 2019

Berdasarkan data pada table 4.1 yang bersumber dari Enrekang Dalam Angka. Tabel tersebut menjelaskan berapa jumlah murid laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan tersebut, namun tidak dapat menjelaskan beberapa jumlah sekolah dan murid yang ada di perkotaan dan perdesaan.

Perkawinan Usia Anak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan sejatinya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga kedua belah pihak siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

Kondisi ini diperparah dengan kepatuhan terhadap hukum yang masih rendah di masyarakat karena ketidaktahuan orang tua mengenai hukum legal dan agama dan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia anak dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan jiwa untuk anak perempuan dan bayi yang dilahirkannya, sehingga masih ada orang tua yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 18 tahun.

Yang perlu dicermati bersama dalam menghadirkan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak adalah menyadari sepenuhnya tentang dampak negative perkawinan usia anak, sehingga akan ada upaya untuk melakukan pencegahan dan menghindarkan anak dari perkawinan usia anak.

Seiring dengan waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan

bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 6. Daftar Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini) tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MAIWA	3	29	32
2	CENDANA	0	8	8
3	ENREKANG	0	23	23
4	ANGGERAJA	1	8	9
5	MASALLE	5	24	29
6	BAROKO	0	11	11
7	ALLA	2	13	15
8	MALUA	0	5	5
9	CURIO	0	6	6
10	BUNTU BATU	1	6	7
11	BARAKA	1	19	20
12	BUNGIN	0	4	4
JUMLAH		13	159	169

Sumber data : Kementerian Agama Republik Indonesia Kab. Enrekang

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah anak dibawah umur yang telah melakukan perkawinan adalah 169 orang pada tahun 2018. Hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang

tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang atau setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Yang menjadi alasan sosial misalnya masih adanya sebagian masyarakat di Enrekang yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya, diduga di beberapa daerah di Enrekang khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan, sehingga bukan dianggap hal yang tabu meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu (Nugraha, 2002):

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
2. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas, juga sebagai salah satu penyebab stunting pada anak.
3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Relasi yang buruk dengan keluarga

Tabel 7. Persentase Penduduk berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Karakteristik dan status Perkawinan Tahun 2018

Status Perkawinan			
Karakteristik	Belum Kawin	Kawin	Cerai
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki laki	4.11	3.59	15.02
Perempuan	6.32	4.27	10.30
Pendidikan Tertinggi			
SD Ke bawah	4.52	4.93	10.14
SMP Ke atas	6.44	3.86	19.65

Sumber: BPS Kab. Enrekang

Untuk tahun 2018 dilihat dari Tabel 4.3 Perempuan yang menikah pertama pada usia 10 tahun ke atas ternyata persentasenya lebih banyak dibanding Laki-laki. Dengan demikian patut menjadi perhatian yang serius mengingat masih banyaknya masyarakat yang menikahkan anak gadisnya dibawah 18 tahun yaitu sebesar 4.27 persen. Faktor budaya yang tercermin dari sikap sebagian orang tua yang merasa takut anaknya menjadi perawan tua, pemahaman yang masih rendah tentang lembaga perkawinan, juga adanya globalisasi yang menyebabkan akses dunia hiburan yang tak terkontrol merupakan faktor penyebab masih banyaknya penduduk yang menikah pada usia dini.

Sosialisasi akan pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian, baik kematian ibu maupun bayinya. Dalam jangka panjang,

ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU

Pemberian ASI pada bayi merupakan hal yang vital bagi tumbuh kembang dan kesehatan bayi. Begitu pentingnya manfaat ASI bagi bayi sehingga tertuang dalam Pasal 24 Poin 2 E Konvensi Hak Anak dan pemerintah daerah pun membuat peraturan tentang ASI eksklusif selama 6 bulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu.

Eksklusif. Diantara manfaat ASI adalah memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi, mempercepat tumbuh kembang bayi, dan meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHO, 2009). Melalui Kepmenkes RI No. 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen.

Tabel 8. Jumlah Bayi yang Mendapat IMD dan di Beri ASI Eksklusif berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia < 6 Bulan		
	Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif	
		Jumlah	%		Jumlah	%
Maiwa	359	307	85.5	320	245	76.6
Cendana	133	120	90.2	134	107	79.9
Enrekang	509	497	97.6	465	402	86.5
Anggeraja	430	414	96.3	460	319	69.3
Alla	384	297	77.3	372	222	59.7
Curio	282	136	48.2	290	169	58.3
Baroko	138	164	118.8	159	142	89.3
Masalle	189	300	158.7	211	149	70.6
Baraka	315	118	37.5	331	289	87.3
Malua	131	216	164.9	115	87	75.7
Buntu Batu	244	64	26.2	353	262	74.2
Bungin	90	104	115.6	94	68	72.3
Jumlah	3204	2861	89.3	3304	2461	74.5

Sumber : Data Profil Kesehatan 2018

Tabel 8 memperlihatkan sebanyak 2461 anak usia di bawah enam bulan di Enrekang diberi ASI Eksklusif. Jumlah bayi yang mendapat IMD sebanyak 2861 orang, sedangkan bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 2461 orang. Data

tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pemberian ASI sudah cukup baik.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada balita sangat dianjurkan, karena ASI mengandung zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi serta mengandung zat penolak/ pencegah penyakit. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah memprogramkan pemberian ASI bagi bayi minimal 4 bulan pertama. Karena pemberian ASI empat bulan pertama diharapkan memberikan daya tahan bayi terhadap berbagai penyakit dan membantu kecerdasan bayi. Kandungan ASI lebih lengkap dibanding makanan tambahan lainnya. Secara psikologis pemberian ASI juga dapat meningkatkan kasih sayang serta “kedekatan” antara ibu dan anaknya.

Tabel 9. Persentase Balita 0-23 bulan menurut pernah/tidak diberi ASI di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

Tahun	Ya	Tidak	%
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	96,74	3,26	100,00
2014	98,36	1,64	100,00
2015	96,62	3,38	100,00
2016	99,50	0,50	100,00
2017	98,96	1,04	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Pada Tabel 9 memperlihatkan bahwa pada umumnya bayi (balita) yang lahir di Kabupaten Enrekang pernah diberi ASI, ada sekitar 1,04 persen

yang tidak pernah mendapat ASI pada tahun 2017. Faktor kemajuan (industri susu) dan emansipasi wanita di lapangan pekerjaan mempunyai andil dalam pemberian ASI kepada anak. Disisi lain meskipun tidak begitu signifikan kampanye pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Enrekang ternyata cukup ampuh jika melihat peningkatan pemberian ASI untuk tahun 2017 persentasenya sebesar 98.96 persen namun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

Imunisasi

Bayi yang baru lahir sudah diberkahi antibodi yang berasal dari sang ibu yang didapat saat masih di dalam kandungan, tapi sayangnya antibodi ini hanya bertahan dalam waktu singkat yakni beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu, bayi akan menjadi mudah terserang berbagai penyakit dan mulai memproduksi antibodi sendiri.

Untuk mencegah kemungkinan si bayi terserang berbagai penyakit, maka orang tua wajib memberikan imunisasi. Program imunisasi merupakan langkah untuk mencegah penyakit menular dengan cara memberikan vaksin pada seseorang sehingga resisten terhadap penyakit tertentu. Manfaat imunisasi pada bayi bagus untuk menghindari penyakit infeksi berbahaya sehingga si bayi bisa tumbuh sehat. Selain itu manfaat imunisasi bisa menurunkan angka kejadian penyakit, nyawa seseorang yang disebabkan oleh penyakit infeksi penyakit infeksi dan epidemic pada generasi mendatang. Secara tidak langsung, manfaat menekan pengeluaran atau menghemat biaya kesehatan. Pemberian imunisasi dimulai sejak usia bayi sampai usia masuk sekolah.

Ada beberapa vaksin yang wajib diberikan pada bayi, yaitu vaksin hepatitis B, BCG, polio, DTP, dan campak. Pemberian imunisasi pada bayi dan balita sesuai waktu, dan jenisnya, jika dilakukan dengan tepat disebut dengan imunisasi lengkap.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat pentingnya imunisasi bagi kesehatan bayi dan balita, utamanya dalam kontribusinya

untuk menurunkan jumlah kematian bayi dan balita di Kabupaten enekang. Imunisasi bayi dan balita ini poin penting yang termuat dalam Pasal 24 Poin 2 F Konvensi Hak Anak, karena lewat imunisasi bayi akan diberikan vaksin yang diisi dengan jenis bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan untuk membentuk antibodi dan merangsang sistem imun di dalam tubuh si anak.

Tabel 10. Cakupan Imunisasi dasar lengkap, dan Imunisasi lanjutan pada bayi menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Bayi	Bayi di Imunisasi			
		Imunisasi dasar lengkap		Imunisasi lanjutan	
	Jumlah	L	P	L	P
Maiwa	901	201	182	269	249
Cendana	181	54	56	39	32
	772	186	196	236	154
Anggeraja	807	179	165	223	240
Alla	940	206	166	284	284
Curio	604	163	105	164	172
Baroko	388	99	60	99	130
Masalle	434	96	89	113	136
Baraka	1137	183	190	394	370
Malua	529	77	70	192	190
Buntu Batu	547	115	115	154	163
Bungin	88	26	18	20	24
Jumlah	7328	1585	1412	2187	2144

Sumber: Data Dinas Kesehatan 2018

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa persentase balita yang pernah diberi imunisasi sebesar 2997 bayi. Yang dimaksud dengan pernah diimunisasi adalah jika seorang balita pernah mendapat imunisasi minimal satu kali apapun jenis imunisasinya. Hal ini mengindikasikan sudah banyak balita yang mendapat imunisasi.

Akses ke Pelayanan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dilihat dari sisi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah akses ke pelayanan kesehatan. Walaupun jumlah pelayanan kesehatan memadai namun bila sulit dijangkau maka fungsinya sebagai tempat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal.

Tabel 11. Cakupan pelayanan anak balita menurut kecamatan kabuapten Enrekang Tahun 2018

KECAMATAN	ANAK BALITA (12-59 BULAN)			
	JUMLAH			Minimal Pelayan Kesehatan (Minimal 8)
	L	P	L+P	
Maiwa	1402	1360	2762	1561
Cendana	487	506	993	580
Enrekang	1793	1809	3602	1767
Anggeraja	1438	1389	2827	1373
Alla/Sudu	745	686	1431	823
Alla/Kalosi	545	500	1045	458
Curio	936	867	1803	1104
Baroko	627	562	1189	606
Masalle	752	691	1443	703
Baraka	1327	1247	2576	1346
Malua	453	457	910	409
Buntu Batu	792	727	1519	754
Bungin	259	242	501	296
Jumlah	11556	11043	22601	11780

Sumber Data : Profil Kesehatan 2018

Tabel 12. Cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut jenis kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Enrekang Tahun 2018

KECAMATAN/PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN BAYI								
	JUMLAH BAYI			L		P		L+P	
	L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Maiwa	183	176	359	173	94.5	177	100.6	350	97.5
Cendana	68	65	133	83	122.1	77	118.5	160	120.5
Enrekang	259	240	499	287	110.8	309	128.8	596	119.4
Anggeraja	224	206	430	260	116.1	261	126.7	521	121.2
Alla/Kalosi	73	73	146	85	116.4	63	86.3	148	101.4
Alla/Sudu	110	128	238	113	102.7	87	68	200	84
Curio	156	126	282	148	94.9	121	96	269	95.4
Baroko	71	67	138	85	119.7	74	110.4	159	115.2
Masalle	97	92	189	69	71.1	90	97.8	159	84.1
Baraka	180	135	315	182	101.1	177	131.1	359	114
Malua	56	75	131	77	137.5	90	120	167	127.5
Buntu Batu	126	118	244	138	109.5	126	106.8	264	108.2
Bungin	41	49	90	47	114.6	34	69.4	81	90
Jumlah	1644	1550	3194	1747	1411	1686	1360.4	3433	1378.4

Sumber Data : Profil Kesehatan 2018

PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU

LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik. Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang

dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Undang Undang No 20 Tahun

2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan definisi anak tersebut, penulisan analisis pendidikan anak menggunakan umur 5-17 tahun.

Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/ belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Gambaran mengenai partisipasi sekolah anak di Kabupaten enekang akan dibahas melalui data Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), AngkaPartisipasi Kasar (APK), angka buta huruf, dan angka putus sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari masing-masing penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan tingkat ketersediaan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah di sini dinyatakan sebagai rasio penduduk yang masih sekolah terhadap penduduk usia sekolah, seperti usia 7–12 (SD/MI), usia 13-15 (SMP/MTs), usia 16-18 (SMU/SMK/MA), usia 19-24 (D1/D2/Akademi/D3/D4/Perguruan Tinggi). Semakin besar Angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan gejala yang semakin baik. Jika dibandingkan angka partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan untuk disetiap jenjang pendidikan di kabupaten Enrekang tahun 2017 angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Ini berarti bahwa porsi penduduk perempuan yang melanjutkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki

Fenomena ini memang terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia, dimana ada pergeseran paradigma, yang dahulu kaum laki-laki lebih dipedulikan masalah pendidikan dibanding perempuan, perlahan kaum perempuan juga diperhatikan. Seperti diketahui bahwa pendidikan untuk

perempuan sangat penting, karena dari perempuanlah nantinya muncul generasi penerus bangsa.

Data tentang tingkat partisipasi sekolah Kabupaten Enrekang tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
1	SD/MI	99,39%
2	SMP/MTs	98,09%
3	SMA/MA/SMK	79,80%

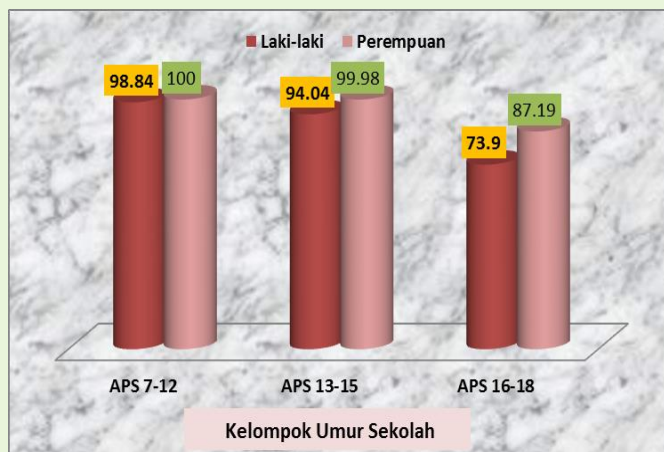
Sumber Data : BPS, Enrekang dalam Angka (diolah)

Tabel 14. Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Enrekang ,2018

Kelompok umur sekolah	Angka Partisipasi Sekolah		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	98.84	100	99.39
13-15	94.04	99.98	98.09
16-18	73.90	87.19	79.80

Sumber data : BPS. Enrekang dalam Angka 2019

Grafik 31. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Enrekang ,2018



Grafik 31. Persentase Penduduk Usia 8-24 Tahun Menurut Status pendidikan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

Pada tabel 14. terlihat persentase penduduk usia 7-12 tahun menurut status pendidikan di kabupaten Enrekang. Penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2016 yang belum pernah bersekolah sama sekali ada sekitar 0,36 persen. Angka ini cukup besar melihat masih ada penduduk yang tidak bersekolah. Kondisi semacam ini sepatutnya mendapat perhatian serius mengingat pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Apalagi dengan program pemerintah daerah yang mencanangkan wajib belajar 12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Sebagai

gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia

7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 15. Angka Partisipasi Murni(APM) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang ,2018

Jenjang Pendidikan	APM (Angka Partisipasi Murni)		
	L	P	L+P
1	2	3	4
SD	98.84	100	99.39
SMP	82.53	80.4	81.42
SMA	55.08	83.95	67.9

Sumber : Enrekang Dalam Angka

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. APK melihat murid yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen

karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Semisal nilai APK SD/ sederajat sebesar 108,32 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat, ada sekitar 8,32 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa yang masih sekolah di SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

Selain itu, untuk tingkat partisipasi usia dini masih perlu ditingkatkan, mengingat stimulasi pengasuhan anak usia dini akan lebih lengkap diterima oleh anak balita di lembaga Taman Kanak-kanak, TKLB, Raudatul Athfal, dan Kelompok Bermain yang dikelola oleh tenaga terlatih pengasuhan anak balita. Penyebaran orangtua di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang, musti diimbangi dengan penyediaan lembaga pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah setempat, utamanya di level Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

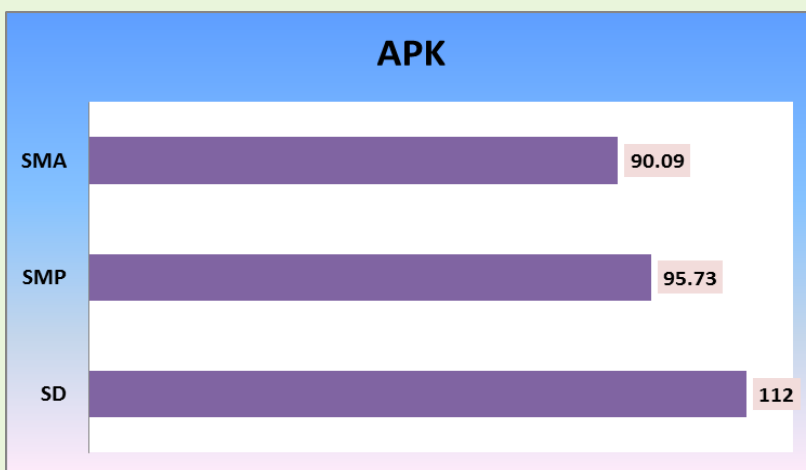
Tabel 16. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang ,2018

Jenjang Pendidikan	APK		
	L	P	L+P
1	2	3	4
SD	108.14	116.26	112
SMP	109.61	83.01	95.73
SMA	70.9	114.12	90.09

Sumber : Enrekang Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 15, angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD sederajat melampaui 100 persen. Ini berarti masih ada anak-anak diatas atau dibawah batasan usia sekolah sesuai jenjang sekolah yang diduduki. Hal ini dimungkinkan terjadi karena satuan pendidikan SD termasuk didalamnya satuan pendidikan sekolah luar biasa, serta paket A yang sebagian diantara peserta didiknya tidak sesuai usia belajar yang seharusnya.

Grafik 32. Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Enrekang, Tahun 2018



Sumber data : Enrekang Dalam Angka

Untuk partisipasi kasar SMP dan SMA sederajat, meskipun didalamnya termasuk pula peserta didik di lembaga sekolah luar biasa dan paket C, namun angkanya masih dibawah 100 persen. Maknanya, partisipasi sekolah anak di jenjang sekolah menengah atas secara umum masih harus ditingkatkan, karena ada kecenderungan trend menurunnya persentase APK di jenjang pendidikan yang semakin tinggi.

Pemanfaatan Waktu Luang

Salah satu pemenuhan hak anak yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan waktu luang. Harapannya, di waktu luang, anak diberi kesempatan untuk membuka cakrawala keilmuan, ketrampilan, maupun pengembangan bakatnya, yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dan passion mereka.

Pada kondisi dewasa ini, kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri oleh penduduk dunia, termasuk di Kabupaten enekang. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari sentuhan teknologi. Begitupun dengan anak-anak. Internet, salah satu wujud teknologi yang akrab dengan anak-anak kita. Dalam hal ini, sangat diperlukan peran pendidikan orang tua dalam “kehidupan online” anak-anak serta pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan terus-menerus sebagai cara untuk meningkatkan keselamatan berinternet. Jika hal ini tidak diimbangi dengan kepedualian orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anak untuk berinternet sehat, maka dampak negative dari internet ini akan lebih nampak di kalangan anak-anak.

Meskipun umumnya para orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, mereka meremehkan tingkat keterlibatan anak-anak dalam mengunduh games, musik dan video kegiatan yang membuat

anak-anak dapat terpapar konten yang tidak layak dan mengungkapkan informasi pribadi. Menurut data dari Dinas Infokom Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 dari jumlah penduduk usia 5- 18 tahun sebanyak 62.957 ada sekitar 60 % yang mengakses Internet. Para orang tua perlu menyadari resiko bahaya mengunduh terutama jika anak-anak melakukan hal tersebut tanpa bimbingan.

PERLINDUNGAN KHUSUS

Anak merupakan individu yang membutuhkan tolongan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum dan hak azasi yang melekat padanya

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak

yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Perihal Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menitikberatkan pada penyelesaian kasus ABH dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak, dan diupayakan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Seyogianya anak yang berhadapan dengan hukum seminim mungkin berakhir di Lembaga Pemasyarakatan sehingga anak dapat menikmati hak-haknya dan dapat tumbuh berkembang secara optimal

Pada tahun 2017 jumlah anak yang berhadapan hukum sebanyak 17 anak dan semuanya adalah anak laki-laki. jumlah anak yang tersandung kriminalitas banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial masyarakat yang mengalami banyak perubahan akibat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang pada akhirnya akan membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perihal Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, menitikberatkan pada penyelesaian kasus ABH dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak, dan diupayakan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Seyogianya anak yang berhadapan dengan hukum seminim mungkin berakhir di Lembaga Pemasyarakatan sehingga anak dapat menikmati hak-haknya dan dapat tumbuh berkembang secara optimal.

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanis dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Mengacu pada proses ini maka terdapat 3 (tiga) tahap sistem peradilan anak yaitu :

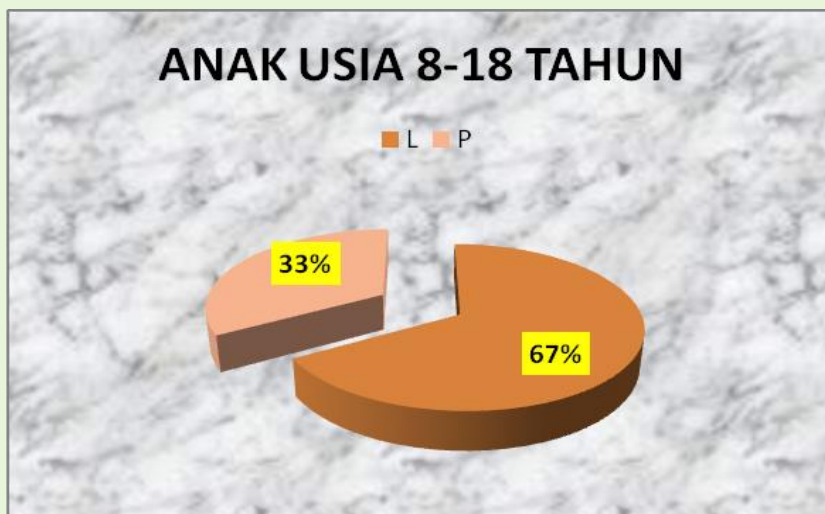
1. Pencegahan anak dari tindak pidana artinya bagaimana kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Ketika anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana anak termasuk apa dan bagaimana bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana anak.

3. Pelaksanaan putusan / hukuman yang dimulai dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

Anak Yang Bekerja

Permasalahan pada anak sangat beraneka ragam dimulai dari kekerasan pada anak, anak jalanan, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum sampai kepada pekerja anak. Kesemuanya diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Penanganan berhadapan dengan hukum baik pada korban maupun pelaku , sangat berhati hati agar mental anak bisa terjaga.

Diagram 9. Jumlah pekerja anak di kabupaten enrekang tahun 2018



Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah anak yang bekerja di kabupaten Enrekang sebanyak 99 anak yang terdiri dari 66 laki-laki dan 33 anak Perempuan, diagram diatas menunjukkan persentase pekerja anak Laki laki dan perempuan.

Pada anak yang bekerja pada usia dini sesungguhnya bukan menjadi pilihan terbaik bagi anak, namun karena kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi keluarga dipandang sebagai penyebab utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Meski demikian, ada sejumlah faktor lain yang juga menjadi penyebab atau akibat dari masuknya anak dalam kegiatan ekonomi diusia muda tanpa kecakapan dan pengetahuan memadai, yaitu kemiskinan pola pikir atau minimnya kesadaran tentang bahaya resiko bekerja pada anak yang dimiliki oleh orang tuanya sehingga banyak keluarga yang terbelenggu oleh kemiskinan dan sebagian dari anak-anak dari keluarga miskin terpaksa ikut membantu perekonomian keluarga.

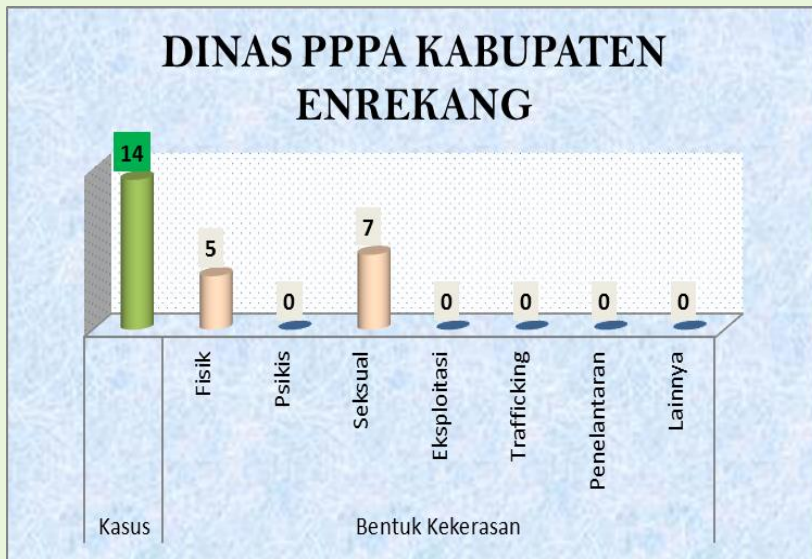
Anak Korban Kekerasan

Penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi.

Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional psikologis, dan pelecehan seksual anak. Berdasarkan data pencatatan dan pelaporan kasus anak di Kabupaten Enrekang pada tahun 2018, terdapat Jumlah kekerasan yang terjadi pada anak berjumlah 14 kasus, dengan jenis kekerasan fisik 5 kasus dan

kekerasan seksual 7 kasus, yang kesemuanya sudah dalam layanan kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum.

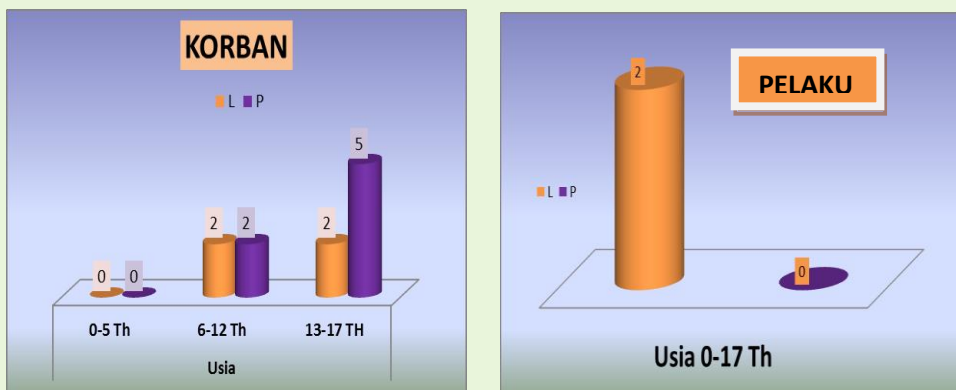
Grafik 33. Report bentuk kekerasan, tempat kejadian dan pelayanan Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Basis Data tanggal Kejadian Semester 1 s/d Semester 2 Tahun 2018



Sumber data: DPPPA Kab. Enrekang

Dari Grafik 33 tersebut nampak kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan, serta kekerasan fisik dengan pelaku adalah orang-orang terdekat dan sebagian berasal dari keluarga miskin. Untuk itu sangat diperlukan perhatian baik dari stakeholder utamanya dari lingkungan keluarga itu sendiri serta pengawasan pemakaian telepon genggam dan pemakaian internet secara negatif.

Grafik 34. Data ciri korban dan pelaku Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Basis Data tanggal Kejadian Tahun 2018



Sumber data : DPPPA Kab. Enrekang

Grafik 34 menunjukkan jumlah anak yang terlibat sebagai korban dan pelaku dalam kasus kekerasan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 . Di mana dapat dilihat korban yang berusia 6-12 tahun yaitu 4 anak laki-laki 2 orang dan 2 anak perempuan, sedangkan korban berusia 13-17 tahun yaitu 7 anak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang dan 5 anak berjenis kelamin perempuan. Selain anak yang menjadi korban ada juga anak sebagai pelaku dalam kasus kekerasan dimana dari diagram diatas menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku ada 2 anak berjenis kelamin laki-laki (anak berhadapan hukum).

TIM PENYUSUN

Ketua : SAWALIAH BAHARUDDIN, SE,MM

Anggota : SURYANI. SKM

ABDUL RAKHMAN, SKM

HJ. ROSMAWATI, S.IP.M.AP

HJ. TASMIATY, SE

HJ. SYAMSIAH, SE

SAMSIR, SKM

HUSMINI HUSAIN, SKM

NUR PRATIWI, SE

RAHMAT HIDAYAT, SKM

MASNI,S.Si

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM KAWIN	72,372	59,303	131,675
2	KAWIN	45,007	47,579	92,586
3	CERAI HIDUP	817	1,921	2,738
4	CERAI MATI	1,369	6,429	7,798
	TOTAL	119,565	115,232	234,797

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 2. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	5,417	1,378	6,795
2	Kecamatan Enrekang	6,972	1,756	8,728
3	Kecamatan Baraka	4,333	1,038	5,371
4	Kecamatan Anggeraja	5,700	1,338	7,038
5	Kecamatan Alla	4,769	982	5,751
6	Kecamatan Bungin	1,089	273	1,362
7	Kecamatan Cendana	2,012	589	2,601
8	Kecamatan Curio	3,259	716	3,975
9	Kecamatan Malua	1,729	507	2,236
10	Kecamatan Buntu Batu	3,558	770	4,328
11	Kecamatan Masalle	2,962	730	3,692
12	Kecamatan Baroko	2,328	554	2,882
	TOTAL	44,128	10,631	54,759

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 3. Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki+ Perempuan		
		Hidup	Mati	JUM	Hidup	Mati	JUM	Hidup	Mati	JUM
1	Kecamatan Maiwa	183	1	184	176	2	178	359	3	362
2	Kecamatan Enrekang	259	2	261	240	2	242	499	4	503
3	Kecamatan Baraka	180	3	183	135	5	140	315	8	323
4	Kecamatan Anggeraja	224	1	225	206	4	210	430	5	435
5	Kecamatan Alla	183	0	183	201	1	202	384	1	385
6	Kecamatan Bungin	41	0	41	49	0	49	90	0	90
7	Kecamatan Cendana	68	0	68	65	1	66	133	1	134
8	Kecamatan Curio	156	2	158	126	1	127	282	3	285
9	Kecamatan Malua	56	1	57	75	4	79	131	5	136
10	Kecamatan Buntu Batu	126	2	128	118	1	119	244	3	247
11	Kecamatan Masalle	97	2	99	92	3	95	189	5	194
12	Kecamatan Baroko	71	4	75	67	1	68	138	5	143
	TOTAL	1,644	18	1,662	1,550	25	1,575	3,194	43	3,237

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 4. Jumlah Anak Balit Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	PUSKESMAS	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Puskesmas Anggeraja	1,438	1,389	2,827
2	Puskesmas Baraka	1,329	1,247	2,576
3	Puskesmas Baroko	627	562	1,189
4	Puskesmas Bungin	259	242	501
5	Puskesmas Buntu Batu	792	727	1,519
6	Puskesmas Kabere	487	506	993
7	Puskesmas Kalosi	545	500	1,045
8	Puskesmas Kota	1,793	1,809	3,602
9	Puskesmas Kotu	0	0	0
10	Puskesmas Maiwa	1,402	1,360	2,762
11	Puskesmas Malua	453	457	910
12	Puskesmas Masalle	752	691	1,443
13	Puskesmas Sudu	745	686	1,431
14	Puskesmas Sumbang	936	867	1,803
	TOTAL	11,558	11,043	22,601

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 5. Jumlah Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	PUSKESMAS	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Puskesmas Anggeraja	680	693	1,373
2	Puskesmas Baraka	684	662	1,346
3	Puskesmas Baroko	303	303	606
4	Puskesmas Bungin	148	148	296
5	Puskesmas Buntu Batu	386	368	754
6	Puskesmas Kabere	301	279	580
7	Puskesmas Kalosi	235	223	458
8	Puskesmas Kota	917	850	1,767
9	Puskesmas Kotu	0	0	0
10	Puskesmas Maiwa	799	762	1,561
11	Puskesmas Malua	212	197	409
12	Puskesmas Masalle	371	332	703
13	Puskesmas Sudu	440	383	823
14	Puskesmas Sumbang	578	526	1,104
	TOTAL	6,054	5,726	11,780

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 6. Jumlah peserta Didik SD LB Menurut Jenis Kelamin umur 7—12 di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ALLA	1,091	946	2,037
2	ANGGERAJA	1,454	1,387	2,841
3	BARAKA	1,261	1,120	2,381
4	BAROKO	737	612	1,349
5	BUNTU BATU	892	839	1,731
6	CENDANA	554	457	1,011
7	CURIO	874	753	1,627
8	BUNGIN	313	269	582
9	ENREKANG	1,723	1,568	3,291
10	MAIWA	1,446	1,321	2,767
11	MALUA	543	479	1,022
12	MASALLE	819	786	1,605
	TOTAL	11,707	10,537	22,244

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 7. Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tingkat Sekolah Menengah Pertama

ID	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	621	588	1,209
2	Kecamatan Enrekang	1,088	869	1,957
3	Kecamatan Baraka	468	428	896
4	Kecamatan Anggeraja	589	554	1,143
5	Kecamatan Alla	496	442	938
6	Kecamatan Bungin	119	128	247
7	Kecamatan Cendana	238	226	464
8	Kecamatan Curio	269	219	488
9	Kecamatan Malua	239	188	427
10	Kecamatan Buntu Batu	306	298	604
11	Kecamatan Masalle	343	350	693
12	Kecamatan Baroko	292	258	550
	TOTAL	5,068	4,548	9,616

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 8. Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	4	0	4
2	SMP/SEDERAJAT	5	0	5
3	SMA / SEDERAJAT	254	26	280
4	D2 / D3	30	50	80
5	S1 / D4	136	189	325
6	S2	4	0	4
	TOTAL	433	265	698

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 9. Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	258	63	321
2	Kecamatan Enrekang	210	49	259
3	Kecamatan Baraka	186	48	234
4	Kecamatan Anggeraja	189	70	259
5	Kecamatan Alla	115	18	133
6	Kecamatan Bungin	59	26	85
7	Kecamatan Cendana	83	24	107
8	Kecamatan Curio	89	146	235
9	Kecamatan Malua	88	48	136
10	Kecamatan Buntu Batu	128	52	180
11	Kecamatan Masalle	79	18	97
12	Kecamatan Baroko	75	26	101
	TOTAL	1,559	588	2,147

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 10. Jumlah Penyuluh pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	14	9	23
2	Kecamatan Enrekang	20	6	26
3	Kecamatan Baraka	8	3	11
4	Kecamatan Anggeraja	7	6	13
5	Kecamatan Alla	2	5	7
6	Kecamatan Bungin	6	0	6
7	Kecamatan Cendana	4	3	7
8	Kecamatan Curio	7	1	8
9	Kecamatan Malua	4	4	8
10	Kecamatan Buntu Batu	6	2	8
11	Kecamatan Masalle	5	0	5
12	Kecamatan Baroko	4	2	6
	TOTAL	87	41	128

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 11. Jumlah Data Penduduk Kecamatan menurut Luas Wilaya, Jumlah Penduduk dan Jumlah Desa/ Kelurahan di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH	
				DESA	KELURAHAN
1	Kecamatan Enrekang	291	32,667	12	6
2	Kecamatan Baraka	159	22,805	12	3
3	Kecamatan Anggeraja	125	25,781	12	3
4	Kecamatan Alla	34	22,650	5	3
5	Kecamatan Bungin	236	4,470	6	0
6	Kecamatan Cendana	91	8,846	7	0
7	Kecamatan Curio	178	16,481	11	0
8	Kecamatan Malua	40	8,329	7	1
9	Kecamatan Buntu Batu	126	13,842	8	0
10	Kecamatan Masalle	68	13,028	6	0
11	Kecamatan Baroko	41	10,642	5	0
12	Kecamatan Maiwa	392	25,286	21	1
	TOTAL	1,781	204,827	112	17

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 12. Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	12,611	12,675	25,286
2	Kecamatan Enrekang	15,941	16,726	32,667
3	Kecamatan Baraka	11,523	11,282	22,805
4	Kecamatan Anggeraja	12,871	12,910	25,781
5	Kecamatan Alla	11,611	11,039	22,650
6	Kecamatan Bungin	2,273	2,197	4,470
7	Kecamatan Cendana	4,262	4,584	8,846
8	Kecamatan Curio	8,435	8,046	16,481
9	Kecamatan Malua	4,068	4,261	8,329
10	Kecamatan Buntu Batu	7,080	6,762	13,842
11	Kecamatan Masalle	6,668	6,360	13,028
12	Kecamatan Baroko	5,476	5,166	10,642
	TOTAL	102,819	102,008	204,827

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 13. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KELOMPOK UMUR	JML PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	11,487	10,972	22,459
2	5-9	11,589	10,932	22,521
3	10-14	11,203	10,520	21,723
4	15-19	9,941	8,629	18,570
5	20-24	6,866	6,197	13,063
6	25-29	7,069	6,889	13,958
7	30-34	6,946	6,919	13,865
8	35-39	6,686	6,731	13,417
9	40-44	6,300	6,235	12,535
10	45-49	5,642	5,740	11,382
11	50-54	4,799	5,357	10,156
12	55-59	3,865	4,360	8,225
13	60-64	3,253	3,956	7,209
14	65+	6,600	14,113	20,713
	TOTAL	102,246	107,550	209,796

Sumber Data : Siga
Enrekang

Lampiran 14. Jumlah Data Anak Nikah Usia Dini Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	DATA ANAK NIKAH USIA DINI		JUMLAH
		L	P	
1	Kecamatan Maiwa	3	29	32
2	Kecamatan Enrekang	0	23	23
3	Kecamatan Baraka	1	19	20
4	Kecamatan Anggeraja	1	8	9
5	Kecamatan Alla	2	13	15
6	Kecamatan Bungin	0	4	4
7	Kecamatan Cendana	0	8	8
8	Kecamatan Curio	0	6	6
9	Kecamatan Malua	0	5	5
10	Kecamatan Buntu Batu	1	6	7
11	Kecamatan Masalle	5	24	29
12	Kecamatan Baroko	0	11	11
	TOTAL	13	156	169

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 15. Jumlah Data Pelaku Usaha Peternakan Menurut Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	JUMLAH PELAKU USAHA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	3,994	0	3,994
2	Kecamatan Enrekang	4,406	0	4,406
3	Kecamatan Baraka	3,912	0	3,912
4	Kecamatan Anggeraja	1,507	0	1,507
5	Kecamatan Alla	573	0	573
6	Kecamatan Bungin	661	0	661
7	Kecamatan Cendana	739	0	739
8	Kecamatan Curio	1,720	0	1,720
9	Kecamatan Malua	2,226	0	2,226
10	Kecamatan Buntu Batu	668	0	668
11	Kecamatan Masalle	1,917	0	1,917
12	Kecamatan Baroko	1,990	0	1,990
	TOTAL	24,313	0	24,313

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 16. Jumlah Pegawai Dinas PU Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	PENDIDIKAN	ASN			PTT		
		LK	PR	JUM	LK	PR	JUM
1	Pasca Sarjana (S-2)	4	0	4	0	0	0
2	Sarjana (S-1)	23	11	34	21	15	36
3	Sarjana Muda / (D3)	2	0	2	2	4	6
4	SLTA	12	3	15	37	15	52
5	SLTP	0	0	0	3	0	3
6	SD	0	0	0	2	0	2
	TOTAL	41	14	55	65	34	99

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 17. Jumlah ASN Dinas PU Berdasarkan Pangkat Golru di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	GOLRU	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ESELON II	1	0	1
2	ESELON III.A	1	0	1
3	ESELON III.B	4	1	5
4	ESELON IV.A	12	6	18
5	JABATAN FUNGSIONAL UMUM/STAF	23	7	30
	TOTAL	41	14	55

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 18. Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	0	1,103	1,103
2	Kecamatan Enrekang	0	967	967
3	Kecamatan Baraka	0	1,108	1,108
4	Kecamatan Anggeraja	0	802	802
5	Kecamatan Alla	0	607	607
6	Kecamatan Bungin	0	447	447
7	Kecamatan Cendana	0	272	272
8	Kecamatan Curio	0	1,060	1,060
9	Kecamatan Malua	0	450	450
10	Kecamatan Buntu Batu	0	1,008	1,008
11	Kecamatan Masalle	0	1,086	1,086
12	Kecamatan Baroko	0	630	630
	TOTAL	0	9,540	9,540

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 19. Jumlah Pengojek Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	13	0	13
2	Kecamatan Enrekang	640	0	640
3	Kecamatan Baraka	75	0	75
4	Kecamatan Anggeraja	40	0	40
5	Kecamatan Alla	207	0	207
6	Kecamatan Bungin	5	0	5
7	Kecamatan Cendana	10	0	10
8	Kecamatan Curio	8	0	8
9	Kecamatan Malua	12	0	12
10	Kecamatan Buntu Batu	13	0	13
11	Kecamatan Masalle	15	0	15
12	Kecamatan Baroko	10	0	10
	TOTAL	1,048	0	1,048

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 20. Jumlah Anak Usia 5-18 Tahun yang Mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	5-9	3	3	6
2	10-14	5	5	10
3	15-18	7	6	13
	TOTAL	15	14	29

Sumber Data : Siga Enrekang

Lampiran 21. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kecamatan di Kab. Enrekang Tahun Data 2018

ID	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Maiwa	263
2	Kecamatan Enrekang	216
3	Kecamatan Baraka	356
4	Kecamatan Anggeraja	266
5	Kecamatan Alla	988
6	Kecamatan Bungin	110
7	Kecamatan Cendana	52
8	Kecamatan Curio	170
9	Kecamatan Malua	196
10	Kecamatan Buntu Batu	374
11	Kecamatan Masalle	95
12	Kecamatan Baroko	272
	TOTAL	3358

Sumber Data : Siga Enrekang

TIM PENYUSUN

Ketua : SAWALIAH BAHARUDDIN, SE,MM

Anggota : ABDUL RAKHMAN, SKM

HUSMINI HUSAIN, SKM

NUR PRATIWI, SE

RAHMAT HIDAYAT, SKM

MASNI, S.Si